



# CATATAN PERJALANAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA DEPOK TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA BAWASLU KOTA DEPOK DALAM MENGAWAL  
DEMOKRASI DI TAHUN 2024



Prepared By:  
**Bawaslu Kota Depok**



Visit Our Website  
[www.kotadepok.bawaslu.go.id](http://www.kotadepok.bawaslu.go.id)

---

# CATATAN PERJALANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA DEPOK

Laporan Kinerja Bawaslu Kota Depok dalam Mengawal Demokrasi di Tahun 2024

---

## Editor

Muhammad Luthfi Lubis,S.AP

## Tim Penulis

Fajri M Fahmi, SE  
Achmad Ichsan Nusapati, S.Ak  
Febriansyah Ramadhan, SH  
Muhammad Luthfi Lubis,S.AP  
Dkk.

## LEMBAR TIM PENYUSUN

CATATAN PERJALANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA DEPOK

Buku Ini Adalah Laporan Hasil Kinerja Bawaslu Kota Depok dalam Mengawal Demokrasi pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Depok

**Penanggung Jawab** Bawaslu Kota Depok

### TIM PENYUSUN

**Pengarah** Weldon Jonas Mawengkang, S.STP., M.PA

**Penyunting** Andriansyah

**Editor** Muhammad Luthfi Lubis

**Pembina** M. Fathul Arif

Sulastio

Risal Randa

Roberto Rossi

**Penulis** Muhammad Luthfi Lubis., Achmad Ichsan Nusapati., Febriansyah Ramadhan., Fajri M Fahmi.

**Kontributor** Yulianingsih,S.H., Chrissanty Harahap,S.Psi., Sugeng Nugroho, S.Kom, Dewi Arti., M. Yudha Aldino., Fathul Arif., Abu Sofyan., Bambang Dwianto., Septi Hambahanti

**Layout** Muhammad Luthfi Lubis

**Sumber Foto** <http://kotadepok.bawaslu.go.id/profil/>



Diterbitkan oleh:

Bawaslu Kota Depok

Jl. Karya Pemuda No. 2, RT 02 RW 04,

Beji Timur Kecamatan Beji

Kota Depok-Jawa Barat (16422)

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Akhir ini yang berjudul “Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Depok Tahun 2024” dapat tersusun sampai selesai.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/DPR RI/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD Kota Depok ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengawasan terhadap seluruh tahapan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan soliditas tim Komisioner beserta jajarannya Panwascam, Pengawas kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Sekretariat Bawaslu Kota Depok yang telah menjalankan pelaksanaan Pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan akhir ini menyajikan secara sederhana dan ringkas namun tetap memuat substansi penting tentang gambaran aktivitas pengawasan Bawaslu Kota Depok selama proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Depok.

Akhir kata semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Depok, 31 Desember 2024

**Bawaslu Kota Depok**

**KETUA**

ttd.

**M. FATHUL ARIF**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. GAMBARAN UMUM .....	3
2. TUJUAN LAPORAN .....	3
3. SISTEMATIKA LAPORAN .....	4
BAB 2 LAPORAN TAHAPAN PEMILU .....	5
1. DAFTAR PEMILIH TETAP .....	5
2. PENCALONAN .....	23
3. KAMPANYE .....	57
4. LOGISTIK .....	81
5. PUNGUT HITUNG DAN REKAPITULASI .....	95
BAB 3 PENUTUP .....	141
1. KESIMPULAN .....	141
2. REKOMENDASI.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	148



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Republik Indonesia.

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi ”

Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”

Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu turut bertanggung jawab atas terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Begitu halnya pula dengan keberadaan Bawaslu Kota Depok, turut menjadi bagian penting bagi mengawal, mengawasi serta melakukan upaya-upaya pencegahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang.

Bawaslu Kota sesuai amanat undang-undangan telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dimulai dari pengawasan partisipatif, yakni mendorong berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, kemudian



melakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, hingga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai acuan dan antisipasi dalam melakukan strategi pencegahan.

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik, serta menekan terjadinya potensi kecurangan dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak.

Bawaslu Kota Depok, memiliki beberapa program kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 bagi mempertegas peran dan fungsi pengawas Pemilu, diantaranya melakukan pengawasan dalam semua Tahapan dan Non Tahapan yang ada didalam PKPU yang dilakukan KPU Kota Depok, membangun pola hubungan kemitraan bersama *stakeholder* dan para pemangku kepentingan Pemilu di daerah, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi bagi meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Bawaslu Kota Depok, termasuk menjalankan fungsi-fungsi pencegahan pada setiap tahapan Pemilu dan meningkatkan peran keHubalan di Bawaslu Kota Depok.

Khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Depok telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok disabilitas, ormas dan lembaga, serta pelaku media (wartawan) yang ada di Kota Depok. Selain itu, melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi bersama *stakeholder*, partai politik dan pihak-pihak lainnya terkait pengawasan semua tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Depok.

Tidak hanya itu, bagi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Depok juga turut membuka pos aduan bagi



masyarakat yang ingin memperoleh layanan terkait tahapan Pemilu yang dilakukan, seperti pos aduan pada tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta membuka layanan pos aduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selamatahapan Pemilu dijalankan.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Pada tanggal 14 februari 2024 di Kota Depok telah dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sarana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/DPR RI/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD Kota Depok dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dimana tugas, wewenang dan kewajibannya di atur Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Depok berjalan sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan berarti.

Pasal 104 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu tugas kewajiban Bawaslu Kota adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

## 1. Profil Bawaslu Kota Depok

Visi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

## 2. Pimpinan Bawaslu Kota Depok

Bawaslu Kota Depok terdiri dari unsur Komisioner sebanyak 5 (Lima) orang sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 dengan Nomor: 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023

- a) Ketua : M. Fathul Arif
- b) SDM dan Organisasi : Roberto Rossi
- c) Pencegahan, Parmas dan Humas : Andriansyah
- d) Penangan Pelanggaran dan Datin : Sulastio
- e) Hukum dan Penyelesaian Sengketa : Risal Randa

## 3. Sekretariat Bawaslu Kota Depok

Bawaslu Kota Depok memiliki Bagian Sekretariat yang berfungsi untuk mensupport kerja-kerja Pimpinan Bawaslu Kota Depok.

- a) Kepala Sekretariat : Weldon J Mawengkang
- b) Kasubag Administrasi : Chrissanty Harahap

- c) Kasubag Hukum, PP dan PS : Yulianingsih
- d) Kasubag Pengawasan Pemilu : Sugeng Nugroho
- e) Bendahara Pembantu : Dewi Arti
- f) Ahli Pertama Perencanaan : Fathul Arif
- g) Ahli Pertama Tata Kelola Pengawas Pemilu : Muhammad Luthfi Lubis
- h) Ahli Hukum Ahli Pertama : Febriansyah Ramadhan
- i) Pranata Humas : M. Yudha Aldino
- j) Staf Pelaksana : Achmad Ichsan Nusapati
- k) Staf Pelaksana : Fajri M Fahmi
- l) Staf Pelaksana : Aulia Miftah Rahma
- m) Staf Pelaksana : Bambang Dwianto
- n) Staf Pelaksana : Septi Hambayanti
- o) Staf Pendukung : Abu Sofyan
- p) Staf Pendukung : Teguh Santoso
- q) Security : Agung
- r) Security : Sulaiman

## B. TUJUAN LAPORAN

Laporan Akhir Pemilu Tahun 2024 ini disusun bertujuan:

1. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada Bawaslu Kota Depok tahun 2024;
2. Memberikan gambaran umum terkait hasil pengawasan pada tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 di Kota Depok;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kota Depok;
4. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal pada tahapan Pemilu 2024;

5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Depok di masa yang akan datang.

### C. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akhir ini adalah;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan sistematika yang ditentukan, yakni sebagai berikut:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN
2. BAB 2 : LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN  
PENCEGAHAN, PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DI KOTA  
DEPOK
3. BAB 3 : REKOMENDASI
4. BAB 4 : PENUTUP



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN**

#### **DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024**

##### **A. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024**

###### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan DaftarPemilih**

###### **a) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Kerawanan pada pemilihan pemilu tahun 2024 tidak banyak berubah dari pemilihan umum tahun 2019. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Dalam IKP, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses Pemilihan Umum yang inklusif dan benar. Kerawanan Subdimensi Hak Pilih terdiri dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT
- 2) Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memiliki KTP-el;
- 3) Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT; dan
- 4) Adanya pembangunan jalan penghubung (TOL) yang membuat pemilih pindah masuk/keluar wilayah pemilihnya

- 5) Tidak adanya kordinasi petugas KPU dengan Disdukcapil terkait Daftar Pemilih Sebelum dirumuskan perencanaan dan strategi pengawasan, Bawaslu Kota Depok melakukan analisa dan pemetaan kerawanan subdimensi hak pilih ini.

Dari keseluruhan indikator yang telah disebutkan, di Kota Depok ditemukan lima kerawanan tersebut yang terjadi di beberapa bagian sub tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih.

## **b) Perencanaan Pengawasan**

### **1) Fokus**

Bawaslu Kota Depok dalam hal ini sangat berfokus pada undang- undang bahkan peraturan dari KPU itu sendiri. Memastikan prosedur dari pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam rencana pengawasan ini Bawaslu Kota Depok ingin memastikan bahwa pantarlih yang terpilih benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

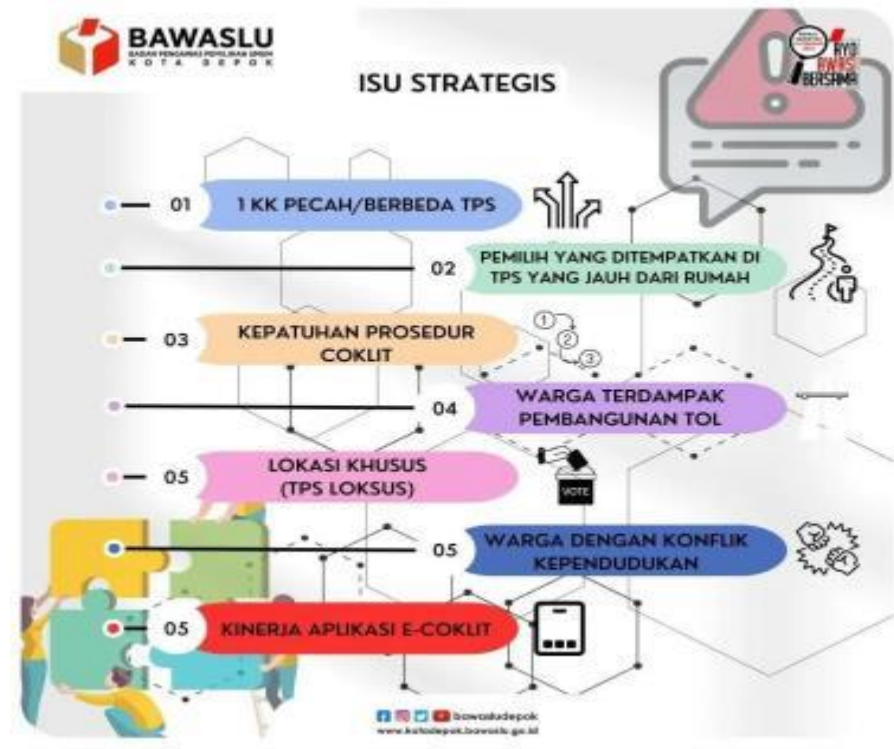
### **2) Strategi dan Kegiatan Pengawasan**

#### **a. Pengawasan Melekat**

Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan melekat untuk memastikan bahwasannya proses pemutakhiran data pemilih ini sudah valid baik dari sistem manual ataupun dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih). Dalam tahapan Ini terdapat 12 sub tahapan yang dilakukan pengawasan secara melekat, mulai dari Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih sampai dengan



Pengumuman DPT di tingkat PPS. Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan melekat dengan melibatkan jajaran Pengawas Kecamatan sampai dengan Pengawas Kelurahan.



Gambar II.1 Isu Grafis

## b. Uji Petik

Bawaslu Kota Depok melakukan uji petik di 10 hari kedua pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih sebagai sampling apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok masih banyak ditemukan bahwa petugas masih bekerja tidak penuh tanggung jawab, antara nya masih banyak petugwas yang tidak memakai atribut untuk turun kelapangan.





Gambar II.2 Hasil Uji Petik

**c. Melakukan Pencermatan**

Bawaslu Kota Depok melakukan pencermatan terhadap sampling yang sudah dilakukan oleh jajaran Pengawas Kecamatan sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi kinerja Jajaran PPK sampai kebawahnya. Dari hasil pencermatan tersebut Bawaslu Kota Depok masih menemukan bahwa pemetaan TPS yang dilakukan oleh PPS masih tidak fokus dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang jauh memilih dari tempat tinggalnya. Ini tentu menjadi catatan dan Bawaslu Kota Depok melakukan evaluasi kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Depok yang nantinya agar di tindaklanjuti.



**HASIL PENGAWASAN**

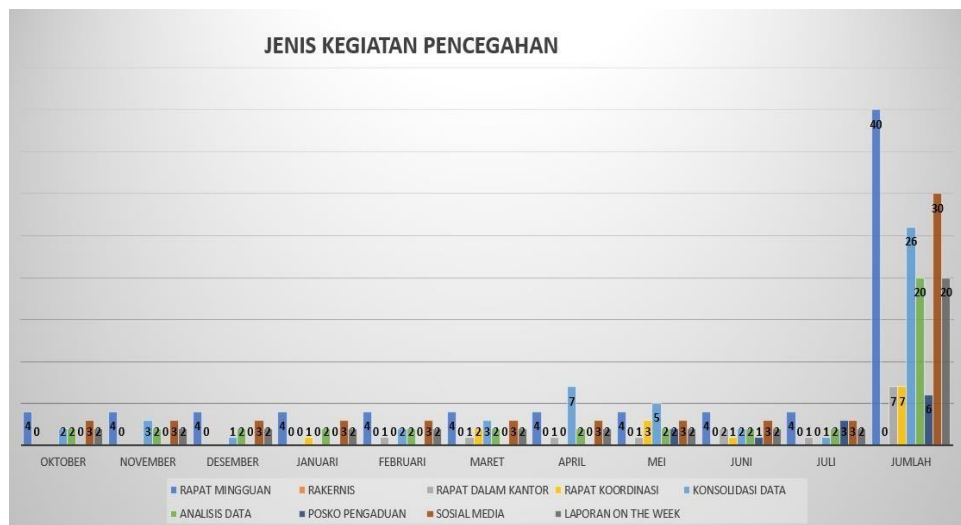


Gambar II.3 Hasil Pengawasan

**2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih**

**a. Pencegahan**

Kegiatan pencegahan merupakan upaya pertama sebagai strategi mengatasi kerawanan di tahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih yang dilakukan sepanjang tahapan. Mulai dari penguatan wawasan internal jajaran pengawas pemilu, sosialisasi dan himbauan ke publik, koordinasi rutin dengan stakeholder, sampai dengan analisa awal pra pengawasan sub tahapan. Sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut:



Gambar II. 4 Grafik Kegiatan Pencegahan



## b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas Pengawasan dalam tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih berlangsung sejak bulan Oktober 2022 hingga Juni 2023. Terdiri dari kegiatan pengawasan melekat, pengawasan langsung, analisa dan investigasi data serta verifikasi faktual dimana isu utama yang muncul berkuat pada soal tertutupan data pemilih by name by address oleh KPU, kegandaan data pemilih dan sinkronisasi SIDALIH. Dalam hal kepatuhan, karena sering kali jajaran KPU lalai dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga Bawaslu Kota Depok kerap kali memberikan teguran secara lisan dan melayangkan surat saran perbaikan ataupun prosedur lainnya yang digunakan dalam Proses Pemuktahiran Data Pemilih. Ketidakpatuhan ini antara lain berupa proses cokolit yang tidak sesuai prosedur, penggunaan joki, dan pelaporan hasil cokolit yang tidak akurat. Tercatat 17 surat saran perbaikan dan rekomendasi telah dilayangkan sepanjang sub tahapan ini, baik di tingkat Kota maupun Kecamatan. Sejak fase penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) penyempurnaan data pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) terkesan tidak rapi. Dalam hal kegandaan, hasil analisa kegandaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menunjukkan masih ditemukan kegandaan antar Kecamatan maupun antar TPS, namun Ketika dilakukan uji silang dengan data SIDALIH tidak ditemukan data yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa tertutupan KPU secara nasional terhadap data pemilih terutama data by name by address A.KWK lebih disebabkan karena tidak sinkronnya data tersebut dibanding isu kerahasiaan data pribadi pemilih.



Perihal kerahasiaan data pribadi, salah satu Pengawas Kelurahan di Kota Depok sempat menemukan pemberian data tersebut oleh oknum PPS kepada pihak di luar penyelenggara yang ditindaklanjuti kemudian dengan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan. Jika dilihat dari

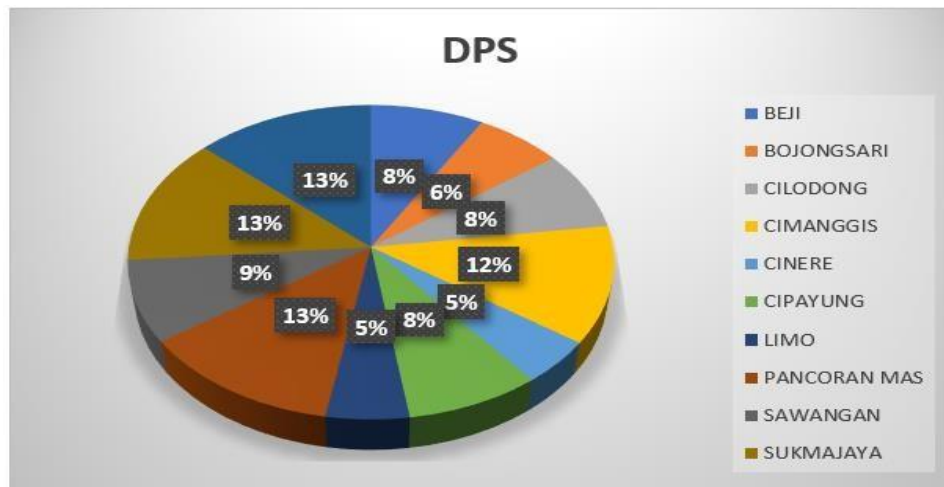
Riwayat, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam daftar pemilih sebagaimana tabel berikut:

KECAMATAN	PEMILIH AKTIF			
	DPS	DPSHP	DPSHPA	SELISIH
BEJI	115917	115177	114999	-918
BOJONGSARI	89869	89459	89379	-490
CILODONG	114216	113741	113684	-532
CIMANGGIS	169160	167958	167809	-1351
CINERE	64448	64158	64034	-414
CIPAYUNG	115164	114701	114505	-659
LIMO	71104	70834	70747	-357
PANCORAN MAS	175931	175264	175025	-906
SAWANGAN	118117	117680	117567	-550
SUKMAJAYA	185089	184192	183892	-1197
TAPOS	183900	183184	183168	-732
<b>TOTAL</b>	<b>1,402,915</b>	<b>1,396,348</b>	<b>1,394,809</b>	<b>(8,106)</b>

Tabel II. 1 Rekapitulasi Jumlah Pemilih

Jika dilihat dari tabel di atas bahwasanya perjalanan daftar pemilih dari tahap cokolit sampai dengan penyusunan DPSHP yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2024 ini hanya mengalami pemutakhiran sebanyak 8.106 pemilih yang dihapus dari daftar pemilih.



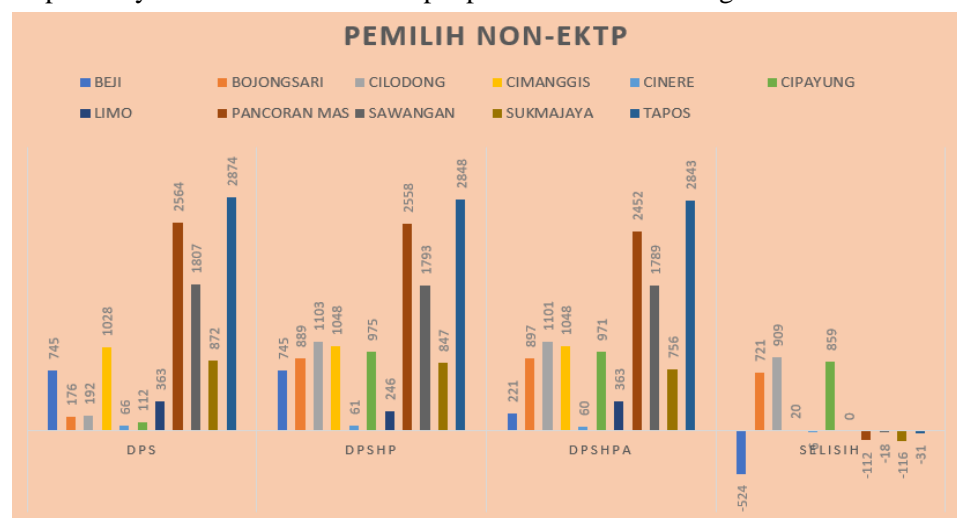


Gambar II. 5 Grafik Persentase DPS

Jika dilihat dari diagram diatas, Kecamatan dengan jumlah persentase pemilih paling banyak penyusutan terdapat pada kecamatan sukmajaya, PancoranMas dan Kecamatan Beji dengan persentase sebanyak 13% pemilih sedangkan Kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit terdapat pada Kecamatan Limo sebanyak 5% Pemilih.

Dan jika dilihat dari jumlah Pemilih yang nantinya akan berpotensi memilih

tanpa adanya KTP-Elektronik terdapat pada Kecamatan sebagai berikut:



Gambar II. 6 Grafik Pemilih Non E-KTP

Jika kita Lihat Grafik di atas menunjukkan bahwa banyaknya Pemilih



yang belum memiliki KTP El pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nanti sebanyak 12.501 Pemilih yang berpotensi bahwa Pemilih diharuskan menggunakan Hak Pilihnya di Atas Jam 12 dan akan berpotensi Golput juga pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwasannya Kecamatan yang sangat besar Pemilih Non KTPnya terdapat di Kecamatan Tapos sebanyak 2.843 Pemilih dapat diartikan hamper 1 RW Pemilih tidak memiliki KTP-EL.

Tidak hanya tentang jumlah pemilih non KTP EL, banyak persoalan dalam tahapan ini yang menjadi sorotan publik seperti jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dengan kategori pemilih tidak di kenal yang cukup banyak di Kota Depok yakni sebanyak 17.182 pemilih, selain itu Pemilih yang berpotensi tidak memiliki KTP Elektronik pada hari pemungutan suara masih perlu di perhatikan. Adapun Data yang telah di Rekap oleh Bawaslu Kota Depok terdapat 12.501 Pemilih berpotensi tidak memiliki KTP Elektronik pada saat pemungutan suara jika dilihat pada pemutakhiran DPHP,

Bawaslu Kota Depok melakukan Imbauan kepada KPU Kota Depok untuk berkoordinasi kepada pihak Disdukcapil terkait Pemilih yang berpotensi tidak memiliki KTP-El pada Pemungutan Suara, Upaya Perbaikan pada DPSHP pun di lakukan oleh Pihak KPU dan Disdukcapil Namun pada Akhir Penetapan DPSHPA Pemilih Berpotensi tidak memiliki KTP Elektronik Bertambah sebanyak 1.702, sehingga Pemilih berpotensi tidak memiliki KTP elektronik pada Penetapan DPT sebanyak 12.501 Pemilih. Adapun Data TMS sebagai berikut:





Gambar II. 6 Grafik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

#### A. Hasil Pengawasan

##### 1) Tidak Tebukanya Data A. KWK

Pada Pemilihan Umum kali ini berbeda dengan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, KPU Kota Depok pada Pemilihan Umum kali ini tidak memberikan akses terhadap data pemilih by name by Address kepada Bawaslu Kota Depok sehingga tidak bisa dilakukan analisis data yang mendalam terhadap daftar pemilih. Menjadi sebuah pertanyaan kenapa Pihak KPU Kota Depok tidak mau membuka Akses terhadap Data tersebut, jika dilihat pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya banyak temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Depok terhadap data tersebut, namun hal tersebut tidak mengurungkan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan, terbukti Bawaslu masih menemukan data ganda pada Daftar Pemilih yang telah di tetapkan oleh KPU Kota Depok.



## 2) Proses Pencocokan dan Penelitian

Bawaslu Kota Depok serta Jajaran Panitia Pengawas Kecamatan Melakukan Pengawasan Melekat dalam Proses Pencatatan dan Penelitian yang dilakukan oleh jajaran KPU, dalam Proses ini Bawaslu menemukan beberapa hal catatan yang terjadi:

- a) Proses cokolit tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur standar. Masih ditemukannya praktik perjokian PPDP di 3 titik, penempelan hanya 1 (satu) stiker untuk 1 rumah tanpa memperhatikan jumlah keluarga yang ada di dalamnya, hingga kelalaian tidak memasukkan seluruh penghuni rumah yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagai pemilih baru menunjukkan bahwasanya kualitas kerja PPDP masih sungguh memprihatinkan.
- b) Proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah pada 14 Februari 2024 dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK;
- c) Proses sinkronisasi tidak menghasilkan Daftar Pemilih yang akurat dan Valid dimana Daftar Model A-KWK masih mencantumkan Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- d) Daftar Pemilih Model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan Pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan Pemilih, ditemukan belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan jumlah Pemilih per TPS pada Pemilu 2024 tidak disusun secara maksimal berdasarkan pada Daftar Pemilih Model A-KWK tersebut.



### 3) Sidalih Tidak Sinkron

Setiap tahapan pemuktahiran Data Pemilih, SIDALIH tidak pernah menemukan performa yang bagus, malah seringkali terjadi server down padahal telah dilakukan penjadwalan input SIDALIH nasional secara bergiliran oleh KPU RI tapi tetap sulit diakses. Sehingga banyak dari proses rekapitulasi dilakukan secara manual baru dilakukan sinkronisasi SIDALIH. Bawaslu Kota Depok dari tingkat Kelurahan dan Panwascam selalu mengawasi aplikasi SIDALIH dan memberikan catatan dan himbauan agar penetapan rekapitulasi secara manual sinkron dengan hasil input SIDALIH.

### 4) Data Ganda

Sejak ditetapkannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Bawaslu Kota Depok Menemukan beberapa Nama Ganda di beberapa Kecamatan.

### 5) Pemilih Non KTP

Bawaslu Kota Depok Menemukan dan telah melakukan Rekapitulasi kepada Daftar Pemilih baik Pemilih Baru maupun Pemilih Pindahan yang berpotensi tidak memiliki KTP Elektronik pada hari Pemungutan Suara, Sebanyak 12.501 Pemilih yang tersebar di setiap kecamatan, dengan Rincian yang sudah di paparkan di atas.



## B. Saran Perbaikan

### 1. Perbaikan Proses Pencocokan dan Penelitian

Bawaslu Kota Depok memberikan sebuah catatan kepada KPU Kota Depok berupa Surat Imbauan untuk melakukan beberapa hal:

- a) Proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah pada 14 Februari 2024 dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK
- b) Proses sinkronisasi tidak menghasilkan Daftar Pemilih yang akurat dan Valid dimana Daftar Model A-KWK masih mencantumkan Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukkan Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan 2019; dan
- c) Daftar Pemilih Model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan Pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan Pemilih, ditemukan belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan jumlah Pemilih per TPS pada pemilihan Umum serentak 2024 tidak disusun secara maksimal berdasarkan pada Daftar Pemilih Model AKWK tersebut.

### 2. Rekomendasi Proses Penetapan DPT

Bawaslu Kota Depok telah memberikan surat Rekomendasi pada Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Surat: 48/BawasluProv.JB-25/PM.00.002/X/2023 Perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Adapun isi



Rekomendasi tersebut sebagai berikut;

### 3. Sinkronisasi Sidalih

Performa Sistem Data Pemilih selalu menjadi temuan dalam setiap proses pemuktahiran Data Pemilih, sehingga Bawaslu Depok tetap tegas meminta setiap proses rekapitulasi baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota, jajaran pengawas Pemilihan wajib memastikan input sidalih telah pula dilakukan (tidak hanya manual) sehingga rekap Daftar Pemilih sinkron dengan SIDALIH. Jajaran pengawas mesti melihat langsung aplikasi tersebut diinput oleh KPU dan jajaran. Begitupun Bawaslu selalu menghimbau agar rekapitulasi tidak ditetapkan sebelum sinkron dengan SIDALIH

### 4. Percepatan KTP Elektronik untuk Pemilih

Dalam Rapat Pleno yang dilakukan di Kantor KPU Kota Depok, Bawaslu Kota Depok telah berkoordinasi langsung kepada Kepala Disdukcapil secara lisan untuk membantu Proses Percepatan Perekapan KTP Elektronik bagi Masyarakat yang belum mendapatkan/belum merekam KTP Elektronik, dikarenakan akan berpotensi menjadi masalah apabila sampai dengan Hari Pencoblosan Masyarakat banyak yang belum memiliki KTP Elektronik.

## C. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Rekomendasi KPU Kota Depok dari Hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Depok ialah sebagai berikut :

- 1) KPU Kota Depok Melakukan Perbaikan dan Teguran Kepada PPS serta jajaran PPDP dalam Melakukan Teknis Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;



- 2) KPU Kota Depok tetap Melanjutkan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan Catatan tetap melakukan Perbaikan dan menghapus Data Ganda Hasil Temuan Bawaslu Kota Depok;
- 3) KPU Kota Depok Melakukan Sinkronisasi Si Dalih dengan Rekapitulasi secara Manual pada setiap Rekapitulasi baik dari Tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota;
- 4) KPU Kota Depok Melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil guna melakukan Percepatan KTP elektronik bagi Pemilih Baru maupun Pemilih yang belum mendapatkan E-KTP.

#### **4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.**

- a) Limitasi akses data.

Pembatasan akses informasi terhadap data *by name by address* (BNBA) baik ketika masih berbentuk DP4, data hasil coklit, data TMS, DPHP, DPS, dan DPSHP hingga DPT membuat penyandingan data menjadi sangat sulit dilakukan. Sedangkan KPU menerapkan klausul wajib menyertakan data BNBA sebagai syarat ditindaklanjutinya saran perbaikan dan atau rekomendasi dari pengawas pemilu.

- b) Sentralisasi proses pembersihan data TMS berbasis *de jure*.

Tingginya jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, khususnya pada kategori pemilih tidak dikenal, meninggal dunia dan TNI/Polri yang tetap muncul dalam proses mutarlih hingga DPT menimbulkan friksi yang cukup tinggi antara jajaran KPU dengan Bawaslu di Kota Depok.



Dengan dalih *de jure* dan perintah atasan (KPU RI), puluhan ribu data "sampah" tersebut tetap muncul dalam setiap seri pleno dari Kelurahan hingga tingkat Kota, terlebih dengan ditutup rapatnya detail data tersebut oleh KPU, menimbulkan pertanyaan besar dari publik tentang validitas data pemilih.

- c) Buruknya profesionalitas jajaran KPU dalam Penyusunan pemilih (mapping TPS).

Munculnya protes masyarakat dan saran perbaikan serta rekomendasi pengawas pemilu terhadap penyusunan pemilih dalam TPS yang tidak memperhatikan prinsip 1 KK tidak terpecah TPS, pertimbangan jarak dari tempat tinggal pemilih ke TPS, dan jumlah yang terlalu dekat dengan ambang batas maksimal jumlah pemilih serta kondisi faktual kewilayahan menambah hiruk pikuk dan sengkabut mutarlih di Kota Depok akibat kinerja yang kurang profesional. Persoalan profesionalitas kerja jajaran PPK dan PPS juga terlihat dari banyaknya peristiwa renvoi (koreksi) pada berita acara (BA) rekapitulasi daftar pemilih di setiap tingkatan.

- d) Pemilih terdampak pembangunan tol dan pemilih dalam wilayah konflik kependudukan.

Mencuatnya persoalan keterjaminan hak pilih warga terdampak pembangunan tol di Kec. Limo dan warga Kampung Merah Putih (KMP) di Kec. Tapos yang masuk kategori wilayah dengan konflik kependudukan kurang mendapat perhatian serius dari KPU Kota Depok di awal periode coklit, dan baru rampung menjelang penetapan DPS.



- e) Mal administrasi penanganan tanggapan masyarakat di PPK dan PPS. Dugaan tindakan inprosedural yang dilakukan oleh jajaran PPK dan PPS se Kota Depok dalam hal penerimaan dan tindaklanjut tanggapan masyarakat paska pengumuman DPS dan DPSHP yang tidak menggunakan prosedur sebagaimana mestinya yakni menggunakan formulir A Tanggapan masyarakat terlihat dari fakta dan keterangan yang didapat bahwa ada PPK dan PPS yang memproses tanggapan masyarakat meskipun hanya disampaikan melalui pesan singkat whatsapp.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya ialah:

- a) Percepatan rilis instruksi pengawasan serta alat kerja
- b) Intensifikasi bimtek pengawasan mutarlih bagi Panwascam dan PKD
- c) Optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam aktivitas pengawasan
- d) Intensifikasi koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kerja-kerja pengawasan, terutama ketika akses data di KPU sangat terbatas
- e) Rasionalisasi dukungan anggaran berbasis kebutuhan
- f) Penambahan tenaga staf pelaksana Bawaslu Kota Depok





## **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

### **A. PERENCANAAN PENGAWASAN**

Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahun 2024 tidak terlepas dari proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai tugas dan tanggungjawab pengawas Pemilu dan memastikan KPU menjalankan Peraturan KPU sesuai dengan yang telah ditentukan. Rencana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada tahapan ini meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Kepengurusan Partai Politik, meliputi SK Kepengurusan, Nama Pengurus (KSB), 30% keterwakilan perempuan dan sebaran pengurus di tingkat kecamatan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap Keanggotaan Partai Politik, meliputi status ASN/TNI/POLRI, KTP, KTA dan Kegandaan Identik Anggota Partai Politik.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap Kantor Partai Politik, meliputi alamat kantor, status kepemilikan kantor dan nomor rekening partai politik.

### **B. KEGIATAN PENGAWASAN**

#### **1. Pencegahan**

Bawaslu Kota Depok memiliki tugas pencegahan untuk mendeteksi dini potensi dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, termasuk pada tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu. Aktivitas pencegahan tersebut meliputi:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas internal sekretariat Bawaslu Kota Depok atas Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi kerawanan proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dari segi hukum, teknis, dan peserta Pemilu itu sendiri.
- 3) Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024.
- 4) Menyusun jadwal pengawasan mulai tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022.
- 5) Menyusun jadwal safari politik ke seluruh parpol di Kota Depok.
- 6) Mengirim surat himbauan kepada pemangku kepentingan Pemilu, khususnya KPU dan Partai Politik di Kota Depok.

## **2. Aktivitas Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok membentuk tim fasilitasi pengawasan sebagai berikut :

	Nama	Jabatan	Kedudukan
<b>I</b>	<b>Pengarah</b>		
1.	Luli Barlini.S.Sos. M,Si	Ketua Bawaslu Kota Depok	Pengarah
2.	Andriansyah., S.HI	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
3.	Willi Sumarlin., S.H	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
4.	Dede Selamat Permana.S.Si	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
<b>II</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
5.	Sriyono., S.Kom., M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Depok	Penanggung Jawab
<b>III</b>	<b>Ketua</b>		
6.	Angga Novi Nugraha	Plt. Koordinator Sekeretariat	Ketua
<b>IV</b>	<b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>		
7.	Sugeng Nugroho	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
<b>V</b>	<b>Anggota</b>		
8.	A. Ichsan Nusapati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Agus Priyadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Aulia Miftah Rahmat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Fajri M. Fahmi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Febriansyah Ramadhan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	M. Lutfi Lubis	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Reynaldy Dzulkaidt	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Siska Andrianika	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Lutfan Dimas Pratama	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Rizky Fahrurroji	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Bambang Dwianto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Septi Hambayanti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Ina Sakinah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Disamping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Bawaslu Kota Depok juga menugaskan jajaran sekretariat untuk menjadi penanggungjawab SIPOL sebagai berikut:

No	Partai	Penanggung Jawab
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Ichsan, Bambang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Luthfi, Rizki
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Agus, Siska
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Fajri, Aul
5	Partai NasDem	Febri, Septi
6	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Reynaldi, Ina, Luthfan
7	Partai Berkarya	Fajri, Aul
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Agus, Siska
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Luthfi, Rizki
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Ichsan, Bambang
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Febri, Septi
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	Reynaldi, Ina, Luthfan
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Ichsan, Bambang
14	Partai Demokrat	Luthfi, Rizki
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	Agus, Siska
16	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Fajri, Aul
17	Partai Gelombang Rakyat (GELORA)	Febri, Septi
18	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	Reynaldi, Ina, Luthfan
19	Partai Ummat	Ichsan, Bambang
20	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Luthfi, Rizki
21	Partai Reformasi	Agus, Siska
22	Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)	Fajri, Aul

## C. Hasil Pengawasan

Sejak dimulainya tahapan Pendaftaran Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Depok sudah melakukan kegiatan pengawasan melekat terhadap KPU Kota Depok dan Partai Politik yang ada di Kota Depok, selain itu Bawaslu Kota Depok juga melakukan pencermatan dan analisis data yang sudah didapatkan melalui akun pantau sipol yang didapatkan dari Bawaslu Republik Indonesia.

### 1) Data Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Depok

#### a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Kepengurusan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor: 26.14-B/KPTS-DPC/DPP/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang mengesahkan Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok masa bakti 2019 – 2024 : Ketua Hendrik Tangke Allo, Sekretaris Ikrawany Hilman, dan Bendahara Yuni Indriany, SE., MSi.

Dari susunan pengurus sebanyak 19 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 6 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 31.58%. Domisili alamat kantor Komplek Ruko Grand Depok City, Sektor Anggrek 1, Blok C1 No. 25 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 31 Desember 2024. Nomor Rekening Bank: 0056153470001, dan

nama bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.  
Cabang Depok.

**b) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)**

Kepengurusan DPK Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nomor: 04/SKEP/DPP/PKPJABAR/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Dwi Ratna Kartikawati, SH, M.Kn, M.BA dan Sekretaris Jenderal Hariyadi Hidayat, S.IP yang mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan Dan Persatuan Kota Depok ( DPK PKP KOTA DEPOK ) masa tugas selama periode 2021-2026: Ketua Cecep Sumitra, Sekretaris Lingga aditya, dan Bendahara Putri Mayang Sari.

Dari susunan pengurus sebanyak 3 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor Kp. Sindangkarsa JL. Madrasah Raya RT 01 RW 07 NO. 5 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok dengan status pinjam pakai, tanggal batas pinjam pakai sampai dengan tanggal 29 Desember 2026. Nomor Rekening Bank: 0126832664100, dan nama bank adalah Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**c) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPW Jawa Barat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor: 054.PD.2/SKEP/AJ-PKS/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua DPW Jawa Barat Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. dan Sekretaris DPW Jawa Barat Ridwan Solichin, M.Si. yang mengesahkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masa bakti selama periode 2020-2025: Ketua Ir. Imam Budi Hartono, Sekretaris Hermanto Setiawan, dan Bendahara Ade Supriyatna.

Dari susunan pengurus sebanyak 121 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 38 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 31.4%. Domisili alamat kantor Jl. Margonda Raya Gg. Beringin RT 02 RW 18 No. 7 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nomor Rekening Bank Bank Syariah Indonesia KCP Depok Margonda.: 7010018573.

**d) Partai Bulan Bintang**

Kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor: SK.PP/888/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Ir. Afriansyah Noor, M.Si yang mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Depok periode 2019 – 2024: Ketua Herry Kurniawan, Sekretaris Leni Septriana, dan Bendahara Suherni.



Dari susunan pengurus sebanyak 11 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 4 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 36.36%. Domisili alamat kantor Jl.Raya Kalimulya Kebon Duren No.84 RT 001/002 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 31 Desember 2024. Akun Rekening Bank Syariah Indonesia: 7799989993.

**e) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**

Kepengurusan DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor: 161-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq yang mengesahkan struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Depok: Ketua Anwar Nurdin, SH, Sekretaris Pardamean Sitompul, SH, dan Bendahara Teguh Onoh, SH.

Dari susunan pengurus sebanyak 5 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 2 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 40%. Domisili alamat kantor Jl. Naming D Bothin No.21-22 Rt.008 RW.019 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 2 Februari 2027. Nomor Rekening: 100-01-089002271-6 dan Nama Bank: MNC BANK.



**f) Partai NasDem**

Kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nasdem Nomor: 33-Kpts/DPP-NasDem/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny Gerard Plate yang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Depok periode 2022 - 2024: Ketua Drg. Hardiono SP. BM, Sekretaris Dr. Sortaman Saragih, dan Bendahara Ir. Wildanela.

Dari susunan pengurus sebanyak 36 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 12 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor Komplek Grand Depok City, Sektor Alamanda Blok A4 No. 64 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 15 Juli 2025. Nomor Rekening: 422-01-000914-56-0 dan Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI).

**g) Partai Kebangkita Nusantara (PKN)**

Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Depok telah disahkan melalui SK Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Nomor: 665/SK/PIMNAS-PKN/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Gede Pasek Suardika, SH., MH, dan Sekretaris Jenderal Dr H. Sri Mulyono, S.Sos., MM. yang mengesahkan susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Partai



Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Depok periode 2022 - 2027: Ketua Supari, Sekretaris Syaifulloh, dan Bendahara Lutfiah Maelani.

Dari susunan pengurus sebanyak 8 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 3 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 37.5%. Domisili alamat kantor di Jalan Boulevard Raya, Cluster Verbena Blok A.22 Grand Depok City (Gdc) Rt 02 Rw 03 dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 252 Desember 2025. Nomor Rekening: 0126602065100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

#### **h) Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)**

Kepengurusan DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nomor: 1067/SK/DPP/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Yohana Murtika yang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kota Depok periode 2020 – 2025: Ketua Asep Mustapa, Sekretaris Wira Aryana Yusuf, dan Bendahara Putri Samsiah.

Dari susunan pengurus sebanyak 7 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 3 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 42.86%. Domisili alamat kantor di Lio, Rt:3/Rw:8, Kelurahan: Bojong Pondok Terong, Kecamatan: Cipayung, Kabupaten: Kota Depok, Provinsi:



Jawa Barat dengan status pinjam pakai, tanggal batas pinjam pakai sampai dengan 31 Juli 2025. Nomor Rekening: 1403042572 dan Nama Bank: Bank Negara Indonesia (BNI).

**i) Partai Demokrat**

Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Demokrat Nomor: 467/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A dan Sekretaris Jenderal H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T yang mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok periode 2022 – 2027: Ketua Ir. Edi Sitorus, Sekretaris H. Endah Winarti, SH dan Bendahara Herry Setiawan.

Dari susunan pengurus sebanyak 20 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 6 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 30%. Domisili alamat kantor di Komplek Ruko Sukmajaya No. 16 Jl. Tole Iskandar dengan status pinjam pakai, tanggal batas pinjam pakai sampai dengan 1 Juni 2027. Nomor Rekening: 0003870847001 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**j) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)**

Kepengurusan DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPW Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Nomor: 010.b/SKEP/DPW-GLR/32/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua H. Haris Yuliana, S.Pd.I., M.AP dan Sekretaris Ir. H. Totong Suparman yang mengesahkan struktur dan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kota Depok periode 2019 – 2024: Ketua Subhan, Sekretaris Ahmad Tarmudli dan Bendahara Ferry Dedy.

Dari susunan pengurus sebanyak 5 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 2 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 40%. Domisili alamat kantor di Jl KSU No.52 RT 002/001 Kel. Tirtajaya Kec . Sukmajaya Kota Depok dengan status pinjam pakai, tanggal batas pinjam pakai sampai dengan 29 Januari 2025. Nomor Rekening: 0125313175100 dan Nama Bank: Bank Jabar Banten.

**k) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Depok telah disahkan melalui SK Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat Partai Hanura Nomor: 022/A.3/DPD-HANURA/JABAR/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua H. Dian Rahadian, SH., M.H dan Sekretaris Cecep Lukmanul H, S.Kom.I., M.Ag yang mengesahkan susunan

kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Depok periode 2020 – 2025: Ketua H. Miftah Sunandar, Sekretaris Tonny Ranti, dan Bendahara Nurjaman, SH., MMSI., M.KN.

Dari susunan pengurus sebanyak 27 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 10 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 37.04%. Domisili alamat kantor di Jln. Palakali Ruko No.1 Perum Putra Mandiri Regency Kel. Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok 16426 dengan status milik sendiri. Nomor Rekening: 114701000242564 dan Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI).

#### **I) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

Kepengurusan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nomor: 04-007/Kpts/DPP - GERINDRA/2017 tanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani yang mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Depok: Ketua Pradi Supriatna, S.Kom, Sekretaris H. Hamzah, SE. MM, dan Bendahara Rezky M. Noor.

Dari susunan pengurus sebanyak 3 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor di GDC Ruko Arcade Blok A No. 16, RT.004 RW.005 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan status

kepemilikan sendiri. Nomor Rekening: 0008364192100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**m) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nomor: 6228/DPP/01/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum A. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid yang mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok masa bakti 2021 – 2026: Ketua M. Faizin, Sekretaris Iwan Setiawan, dan Bendahara Mustopa Dwi Putra.

Dari susunan pengurus sebanyak 62 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 20 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 32.26%. Domisili alamat kantor di Jl. K.h M. Yusuf Raya Raya No. 54 D Rt. 005 Rw. 022 Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 31 Desember 2024. Nomor Rekening: 0066442799100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**n) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**

Kepengurusan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nomor: 391/SK/DPP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa

dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni yang mengesahkan struktur pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok masa bakti 2019 – 2024: Ketua Oparis Simanjuntak, Sekretaris Andi Rudini Lumban Gaol, dan Bendahara Nining Yuningsih.

Dari susunan pengurus sebanyak 5, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 2 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 40%. Domisili alamat kantor di GDC Ruko Anggrek-3 Blok C No.9 Jl. Boulevard Raya Rt.007/004 Kota Depok dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 30 Desember 2024. Nomor Rekening: 0079415618100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**o) Partai Amanat Nasional (PAN)**

Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/173/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno yang mengesahkan struktur pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok masa bakti 2020 – 2025: Ketua H. Igun Sumarno, S.Pd.M.M, Sekretaris Nurhasan, dan Bendahara Afrian Setyowati.

Dari susunan pengurus sebanyak 37, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 15 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 40.54%. Domisili alamat kantor di Perumahan/Cluster Alamanda Timur



Block A4 No. 8 Rt 03/09 Jln Boulevard Grand Depok City Kota Depok dengan status sewa, tanggal batas sewa sampai dengan 31 Desember 2024. Nomor Rekening: 0068391741100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**p) Partai Golkar**

Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kota Depok telah disahkan melalui SK DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor: KEP-97/GOLKAR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily dan Sekretaris Ir. H.M.O. Iswara. AIFO yang mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Depok masa bakti 2020 – 2025: Ketua Farabi El Fouz, Dr. Sp.A., M.Kes, Sekretaris H. Dindin Saprudin, dan Bendahara H. Tajudin Tabri.

Dari susunan pengurus sebanyak 37, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 13 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 35.14%. Domisili alamat kantor di Jl. Boulevard No.23 Perum. Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok dengan status milik sendiri. Nomor Rekening: 0091996219100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).



**q) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor: 0207/SK/DPP/C/XI/2021 tanggal 20 November 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jendral H. M. Arwani Thomafi yang mengesahkan susunan dan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok masa bakti 2021 – 2026: Ketua Mazhab H.M., Sekretaris Ma'mun, dan Bendahara Sri Eny Haryani.

Dari susunan pengurus sebanyak 3, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor di Jl. Sawangan Permai Ruko Sawangan Permai No. B 16 RT 001 RW 007 dengan status sewa, batas sewa 1 Juli 2025. Nomor Rekening: 0075605943100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**r) Partai Buruh**

Kepengurusan Komite Eksekutif Kota (EXCO KOTA) Partai Buruh Kota Depok telah disahkan melalui SK Komite eksekutif Partai Buruh Nomor: 017/L/SK.KAB-KOTA/EXCO - PB/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Komite Ir. H. Said Iqbal, ME. dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzaril, SE,. SH. yang mengesahkan susunan pengurus Komite

Eksekutif Kota Partai Buruh Kota Depok periode 2021 – 2026: Ketua Wido Pratikno, Sekretaris Sudarso, dan Bendahara Tri Handayani Yuhana.

Dari susunan pengurus sebanyak 3, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor di Jl. Kenanga I No. 168 Kota Depok dengan status sewa, dengan tanggal batas sewa 2 Juni 2027. Nomor Rekening: 339-01-002679-30-5 dan Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI).

**s) Partai Republik**

Kepengurusan DPD Partai Republik Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Republik Nomor: JB769899.02.SKP.0617 tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Suharno Prawiro dan Sekretaris Jenderal Unggul Hermei Kurniawan yang mengesahkan struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Republik Kota Depok periode 2021 – 2022.

Dalam susunan pengurus terdapat perbedaan antara SIPOL dan SK Kepengurusan didalam SK kepengurusan sebagai berikut: Ketua Jufri, Sekretaris Imron Rosyadi, dan Bendahara Firda Aniwahyuni. Pengurus sebanyak 3 orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Sedangkan dalam SIPOL susunannya sebagai berikut: Ketua Jufri, Sekretaris Imron Rosyadi, dan Bendahara Imron Rosyadi. Karena pengurus sebanyak 3 orang dan

tidak terdapat perempuan, sehingga keterwakilan perempuan dalam pengurus tidak terpenuhi atau sebesar 0%.

Domisili alamat kantor di KKDR Anghrek 3 Blok C.1/27 Rt. 007/004 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan status sewa, tanggal batas sewa 3 November 2025. Nomor Rekening: 0081162530100 dan Nama Bank: Bank Daerah Jawa Barat (BJB).

**t) Partai Ummat**

Kepengurusan DPD Partai Ummat Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Ummat Nomor: 0217/01.32.76/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/IV/2022 tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., m.Sc. dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muhajir, S.H., M.H yang mengesahkan struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Depok periode 2021 – 2025: Ketua Bachtiar Dewantara, Sekretaris Agung Murdono, dan Bendahara Ika Irmawati.

Dari susunan pengurus sebanyak 10, orang terdapat pengurus perempuan sebanyak 4 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 40%. Domisili alamat kantor di Kp.Lio Rt 008/019.Kel.Depok.Kec.Pancoran Mas. Kota Depok dengan status sewa, tanggal batas sewa 25 Desember 2024. Nomor Rekening: 7312008216 dan Nama Bank: Bank Syariah Indonesia (BSI).

**u) Partai Republik Indonesia**

Kepengurusan DPC Partai Republik Indonesia Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Republik Indonesia Nomor: 12.25/SK-DPP/DPC-KOTA DEPOK/7-2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ramsed D. Simanjuntak, M.Si dan Sekretaris Jenderal Elkana Otniel Jaisar, S.E yang mengesahkan pengurus Cabang Partai Republik Indonesia Kota Depok periode 2022 – 2027: Ketua Asep Dani H, Sekretaris Neng Ida R, dan Bendahara Karno.

Dari susunan pengurus sebanyak 3 orang, terdapat pengurus perempuan sebanyak 1 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 33.33%. Domisili alamat kantor tertulis di SIPOL adalah di Kota Depok dengan status milik sendiri. Nomor Rekening: 026101002289303 dan Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI).

**v) Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)**

Kepengurusan DPD Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) Indonesia Kota Depok telah disahkan melalui SK DPP Partai Republik Indonesia Nomor: 0023-A012-B023/DPD-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Drs. H.M. Jusuf Rizal, SE., SH., M.Si. dan Sekretaris Jenderal Syaefunnur Maszah, SH., MM. yang mengesahkan pengurus Daerah Partai

Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) Kota Depok periode 2022 – 2027.

Dalam susunan pengurus terdapat perbedaan antara SIPOL dan SK Kepengurusan didalam SK kepengurusan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Alit Rizlananda Yusuf, Sekretaris Lusiana Damaiyanti, dan Bendahara Mawar Yantesa. Sedangkan didalam SIPOL susunan pengurusnya sebagai berikut: Ketua Ali Redo Marbun, Sekretaris Nana Khairuna, Dan Bendahara Ema Septiana.

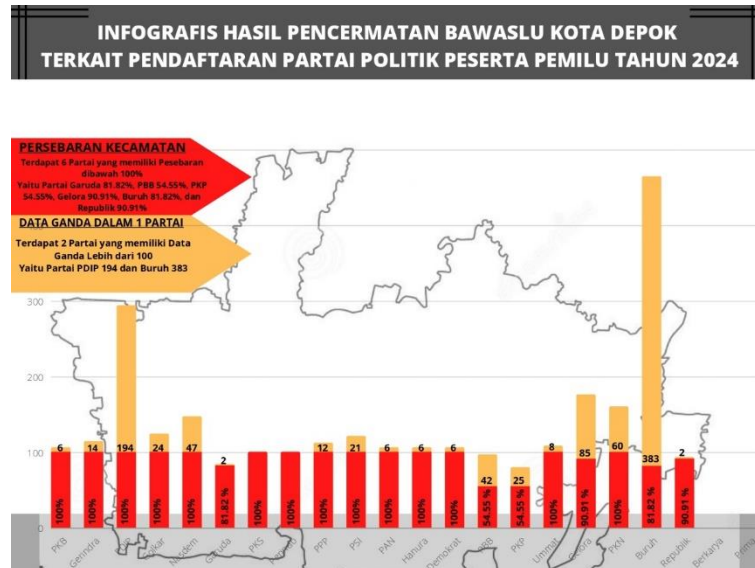
Dari kedua susunan pengurus tersebut anggota pengurus sebanyak 3 orang, terdapat pengurus perempuan sebanyak 2 orang, jumlah keterwakilan perempuan sebesar 66.67%. Domisili alamat kantor tidak tertulis didalam SIPOL. Nomor Rekening: 033201001909563 dan Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI).

## 2) Pencermatan Pendaftaran Partai Politik

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kota Depok selama tahapan Pendaftaran Partai Politik ditemukan berbagai fakta yang terjadi pada Partai Politik di Kota Depok, sebagaimana yang tercantum dalam infografis berikut ini:



Disamping itu, Bawaslu Kota Depok juga mencermati banyaknya kegandaan data keanggotaan partai politik di Kota Depok sebagaimana tercantum dalam infografis dibawah ini:



### 3) Verifikasi Administrasi

Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Verifikasi Administrasi di Kota Depok

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik	Jumlah Anggota yang Diajukan	Jumlah Potensi Ganda Internal	Jumlah Potensi Ganda Eksternal	Jumlah Anggota Berpotensi TMS
1	Kota Depok	PERINDO	1.254	0	128	0
		UMMAT	2.591	8	122	0
		PARSINDO	1.188	0	0	0
		PSI	2.020	21	0	2
		REPUBLICU	1.350	900	0	0
		REPUBLIC SATU	1.344	0	0	0
		REPUBLIC	1.077	2	0	0

	PPP	3.662	12	2	0
	NASDEM	1.431	47	4	0
	PKN	3.075	60	0	0
	PKB	1.655	6	0	0
	PKS	1.100	0	3	0
	PKP	1.023	25	0	0
	HANURA	1.102	6	0	0
	GOLKAR	1.560	24	11	0
	GERINDRA	2.204	14	0	0
	GELORA	1.149	85	10	0
	GARUDA	1.114	2	0	0
	DEMOKRAT	1.245	6	0	0
	PDIP	2.450	194	11	0
	BURUH	2.267	382	0	2
	PBB	1.018	42	0	0
	PAN	1.312	6	8	0
<b>Total Kota Depok</b>		<b>38.191</b>	<b>1.842</b>	<b>299</b>	<b>4</b>

1. Penyampaian Hasil Pengawasan/Saran Perbaikan/Temuan

Sejak dimulainya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok telah melakukan kegiatan pengawasan melekat terhadap KPU Kota Depok dan Partai Politik yang ada di Kota Depok. Hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya:

a) Kegandaan Identik dalam Satu Partai Politik

Pada saat melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Depok hanya memeriksa input data NIK dan Nomor KTA yang diinput ke SIPOL tanpa menyangdingkan dengan lampiran foto KTP dan KTA yang terlampir.

Sehingga Bawaslu Kota Depok menemukan data ganda atas nama Fitri Yani sebagai Anggota PSI dengan NIK dan Nomor KTA yang berbeda namun KTP yang terlampir sama. Adapun Jumlah Keseluruhan Anggota Partai Politik di Kota Depok yang dilakukan Verifikasi Administrasi sebanyak 38.121 data dari 23 Partai Politik.

b) Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

Bawaslu Kota Depok menemukan selisih 52 data keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang belum dapat dilakukan Verifikasi Administrasi dikarenakan jumlah anggota yang tertera dalam laman SIPOL KPU Kota Depok sebanyak 1.023 Anggota, namun ketika operator KPU mengklik laman tersebut, hanya muncul 971 Anggota.

Sehingga presentase proses Verifikasi Administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Depok pada awalnya hanya tercapai 99,86%. Namun di akhir masa Verifikasi Administrasi, masalah

tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU RI, sehingga presentase akhir proses Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Depok telah mencapai 100%.

- c) Menemukan Anggota Partai Politik yang Berprofesi sebagai Polri dan TNI

Pada saat melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok mendapati data keanggotaan partai politik atas nama I Wayan Tirta Utama dengan NIK 32760423108400010 dan status pekerjaan POLRI serta atas nama H. Moch. Nur Hasyim dengan NIK 3578052809790001 dan status pekerjaan TNI pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Seketika itu juga, Anggota Partai Politik tersebut dirubah statusnya menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kota Depok.

- d) Perubahan Elemen Verifikasi Administrasi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat perubahan empat elemen dalam penentuan status keanggotaan Partai Politik yang Memenuhi Syarat (MS) yaitu nama, NIK, Jenis Kelamin, Tanggal lahir.

Dan yang dihapus dari elemen verifikasi berdasarkan Keputusan KPU tersebut yakni status kawin, tempat lahir dan pekerjaan. Hal ini menyebabkan perubahan jumlah status MS pada keanggotaan Partai Politik di SIPOL.

e) Perubahan Undangan Klarifikasi di Tengah Proses

Jumlah anggota partai politik yang diundang untuk klarifikasi pada awalnya berjumlah 299 orang. Namun setelah melakukan pengecekan kembali pada laman SIPOL, KPU mendapati perubahan data sebanyak 4 orang dengan total 303 orang dari 10 partai politik.

Perubahan data tersebut dikarenakan ada partai politik yang baru mengunggah surat pernyataan pada tanggal 4 September 2022 malam hari. Sehingga KPU Kota Depok baru membuat surat undangan untuk klarifikasi data ganda antar anggota partai politik tersebut pada tanggal 5 September 2022.

f) Selisih Jumlah Peserta Klarifikasi

Bawaslu Kota Depok mendapati selisih dan ketidakcocokan data antara undangan klarifikasi yang hadir dengan daftar hadir yang disediakan oleh KPU Kota Depok. Hal ini disebabkan tidak adanya

petugas KPU Kota yang bersiaga di meja dafar hadir undangan klarifikasi.

g) Fluktuasi Jumlah Anggota Partai Politik yang Memenuhi Syarat (Form A-78)

Salah satunya adalah partai Perindo yang ditemukan setelah proses klarifikasi oleh KPU Kota Depok sebanyak 124 (data naik secara signifikan). Bahwa jumlah anggota MS (memenuhi syarat) pertanggal 30 Agustus 2022 sebanyak 896 jumlah anggota Partai Politik, sedangkan pertanggal 5 September 2022 setelah proses klarifikasi dilakukan oleh KPU Kota Depok menjadi 1020 jumlah anggota partai politik (terjadi lonjakan memenuhi syarat sebanyak 124 data).

Menurut Informasi yang di dapat dari Admin SIPOL terkait penambahan jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) sudah ada 10 anggota partai perindo yang melakukan klarifikasi dan dinyatakan Memenuhi Syarat. Dari 23 Partai Politik sebanyak 303 orang, sedangkan yang hadir langsung ke KPU Kota Depok di tanggal 4 dan 5 September 2022 sebanyak 30 orang. Sehingga 273 sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KPU Kota Depok Menjelaskan Bahwa terjadi kenaikan jumlah memenuhi syarat atau pergerakan data Verifikasi administrasi di sebabkan karena 3 hal, yaitu:

1. Proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang surat pernyataannya beririsan dengan partai lain;
2. Proses Verifikasi terhadap tindak lanjut dari partai politik terkait status belum memenuhi syarat;
3. Penyandingan NIK dalam Sipol dengan data SIAK yang di berikan oleh KPU Kota Depok (Akses SIAK d buka oleh KPU Kab/Kota).

Pergerakan data ini terjadi hampir di semua Partai Politik.

h) Posko Pengaduan Masyarakat

Bawaslu Kota Depok telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat dengan tujuan mengakomodir aduan masyarakat yang data pribadinya tercatat dalam SIPOL. Posko Pengaduan Masyarakat hingga saat ini telah menerima 11 aduan masyarakat yang data pribadinya tercatat dalam SIPOL tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Aduan masyarakat tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kota Depok secara langsung maupun tidak langsung. Disampaikan secara langsung dengan cara masyarakat mendatangi langsung kantor Bawaslu Kota Depok untuk melakukan aduan. Sedangkan dengan cara

tidak langsung, masyarakat menyampaikan aduannya melalui Whatsapp Posko Pengaduan Masyarakat dan akun Instagram Bawaslu Kota Depok.

## 2. Tindaklanjut KPU Kota Depok

Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok telah mengirimkan Rekomendasi Saran Perbaikan kepada KPU Kota Depok dengan isi sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok menunjukkan adanya kegandaan data Keanggotaan Partai Politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- 2) Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi serta Menindaklanjuti Data Ganda Anggota Partai Politik dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sebagaimana terlampir;
- 3) Agar Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyampaikan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi ini secara tertulis kepada Bawaslu Kota Depok.

KPU Kota Depok telah menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Depok dalam bentuk merubah status kegandaan identik dalam satu parpol menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Selain itu, KPU Kota Depok juga telah menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang data pribadinya tercatat dalam SIPOL tanpa persetujuan yang

bersangkutan. Namun yang menjadi catatan kritis adalah dari 11 tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Depok, hanya 8 tanggapan yang ditindaklanjuti, sementara 3 tanggapan masyarakat yang lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena partainya tidak terdaftar pada KPU RI.

#### D. Verifikasi Faktual

Dalam melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kota Depok menugaskan jajaran sekretariat untuk melakukan pengawasan secara langsung dan melekat di kantor Partai Politik dengan pembagian sebagai berikut:

NO	PARTAI	PENGAWAS
1	Partai Ummat	Sriyono, S.Kom., M. Pd
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Muhammad Luthfi Lubis
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	Dede Selamet Permana, S.Si
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Fajri Muhammad Fahmi
3	Partai Gelombang Rakyat (GELORA)	Andriansyah, S.HI
	Partai Kebangkitan Nasional (PKN)	Agus Priyadi
4	Partai Buruh	Luli Barlini, S.Sos., M.Si
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Aulia Miftah Rahmat
5	Partau Garda Perubahan Indonesia Indonesia (GARUDA)	Achmad Ichsan Nusapati
		Rizki Fachrurroji

Kemudian pada tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok menugaskan delapan pengawas

untuk mengawasi proses verifikasi faktual keanggotaan yang dilaksanakan oleh KPU di lapangan. Delapan pengawas tersebut diantaranya:

NO	NAMA PENGAWAS	KECAMATAN
1	Achmad Ichsan Nusapati	Beji, Cinere, Limo
2	Muhammad Luthfi Lubis	Cimanggis
3	Agus Priyadi	Pancoran Mas
4	Fajri Muhammad Fami	Sukmajaya
5	Febriansyah Ramadhan	Tapos
6	Reynaldi Dzulkaidt	Sawangan, Bojongsari
7	Rizki Fachrurroji	Cipayung
8	Bambang Diwiyanto	Cilodong

Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan proses Verifikasi Faktual di lapangan dengan pendekatan pencegahan atas potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Sehingga segala bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas verifikasi KPU Kota Depok dicegah secara langsung di lapangan saat pelaksanaan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan pengawasan langsung dan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan di lapangan:

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Sampel	STATUS	
				MS	TMS
1	PARTAI PERINDO	1166	289	264	25
2	PSI	1715	314	198	116
3	PKN	2942	340	11	329
4	PARTAI HANURA	1061	282	206	76
5	PARTAI GELORA	1071	283	267	16
6	PARTAI GARUDA	1078	283	3	280
7	PARTAI BURUH	1937	321	193	128
8	PBB	1115	286	35	251
9	PARTAI UMMAT	2166	326	182	144

Dari sembilan partai yang dilakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan, seluruhnya memenuhi syarat. Sedangkan pada Verifikasi Faktual Keanggotaan, hanya lima partai yang memenuhi syarat, yakni Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Sementara empat partai lainnya yakni Partai Kebangkitan Nasional, Partai Hanura, Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang belum memenuhi syarat, sehingga dilakukan Verifikasi Perbaikan Keanggotaan.

#### **E. Aduan Masyarakat**

Selain melakukan pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok juga membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat yang tercatat menjadi anggota partai Politik.

Sejak dibuka mulai tanggal 12 Agustus 2022, Bawaslu Kota Depok telah menerima 22 aduan masyarakat yang tercatat Namanya menjadi anggota Partai Politik, dimana 10 orang diantaranya adalah Pendaftar Panwaslu Kecamatan. Rincian pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Kota Depok adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Aduan	Nama Partai	Keterangan
1	Rahardian Wahyu Pradana	3/9/2022	Republik Satu	Belum Dihapus
2	Deliana Sartika	8/8/2022	PKN	Belum Dihapus
3	Adelia Puspita Ayu	5/9/2022	Pandu Bangsa	Belum Dihapus
4	Dedien Yudha Pratama	5/9/2022	Garuda	Telah Dihapus
5	Debora Ayu Sita	12/9/2022	Golkar	Telah Dihapus
6	Wildhan Khalyubi	13/9/2022	PBB	Telah Dihapus
7	Desi Ana Angraini	14/9/2022	Ummat	Telah Dihapus
8	Ahwazi Adhiatma	19/9/2022	NasDem	Telah Dihapus
9	Moch Yusuf	2/11/2022	Partai Perindo	Belum Dihapus
10	Ersi Saraswati	24/9/2022	PAN	Belum Dihapus
11	Syamsu Priatmojo	26/9/2022	Golkar	Telah Dihapus
12	Lindar Adhiyatma	26/9/2022	PSI	Telah Dihapus
13	Eni Juhaeni	26/9/2022	Ummat	Belum Dihapus
14	Ariandi Wiratsongko	27/9/2022	Republik	Belum Dihapus
15	Fatah Hidayat	27/9/2022	PDIP	Belum Dihapus
16	Wiwini Erni Hidawati	27/9/2022	PKS	Belum Dihapus
17	Siti Holilah	7/10/2022	Nasdem	Belum Dihapus
18	Mida Sahara	8/10/2022	PSI	Belum Dihapus
19	Andriyoko	3/9/2022	Republik Satu	Belum Dihapus
20	Samsuri	8/8/2022	PKN	Belum Dihapus

21	Eddy Prabowo	5/9/2022	Pandu Bangsa	Belum Dihapus
22	Yusuf	5/9/2022	Partai Garuda	Belum Dihapus

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada laman [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik) , dari 22 aduan yang masuk ke Bawaslu Kota Depok, baru 7 aduan yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Depok dan dihapus datanya dari SIPOL. Sementara 15 lainnya belum ditindaklanjuti sehingga namanya masih tercantum dalam SIPOL.



## **PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG**

### **A. Penyusunan Program Kerja**

Partisipasi politik sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat merupakan aspek yang sangat pokok dalam proses demokrasi. Salah satu tujuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah menggalakkan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilu seharusnya dimulai dengan sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari pihak Bawaslu kepada masyarakat.

Dalam rangka persiapan pengawasan Kampanye, Pengawasan Dana Kampanye dan Pengawasan Masa Tenang serta dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Depok melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk metode seperti sosialisasi, Kelurahan anti politik uang, menciptakan kader pengawasan partisipatif, menjalin MOU/kerja sama dengan Stake Holder dilingkungan Pemerintah Kota Depok, menjalin MOU dengan perguruan tinggi, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Depok serta dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah Kota Depok.

Penyusunan program kerja dalam pengawasan Kampanye, Pengawasan Dana Kampanye dan Pengawasan Masa Tenang dimulai dengan perencanaan anggaran pengawasan, penyusunan alat kerja pengawasan,

pembuatan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan penyusunan berbagai bentuk kegiatan.

Bawaslu Kota Depok dalam persiapan Pengawasan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
2. Melakukan koordinasi dengan Partai Politik se-Kota Depok;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok;
4. Dalam pelaporan Dana Kampanye Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap KPU yang melakukan KSA ke Partai Politik;
5. Melakukan bimbingan teknis jajaran pengawasan Adhoc Panwaslu Kecamatan;
6. Melakukan Supervisi dan pendampingan kesetiap Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok.

Disamping kegiatan tersebut Bawaslu Kota Depok juga membuat alat kerja pelaporan dalam pengawasan kampanye yaitu dengan menggunakan Google Drive yang memuat laporan cepat harian pengawasan kampanye serta LHP dan alat kerja hasil pengawasan dari setiap Kecamatan diupload ke server tersebut.

## B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

### 1. Pengawasan Kampanye

Pengawasan kampanye di wilayah Kota Depok tidak ada jadwal secara keseluruhan dari masing-masing Peserta Pemilu, akan tetapi jadwal kampanye itu biasa disampaikan H-2 atau H-1 berbarengan dengan STPP kampanye.

Peserta Pemilu di Kota Depok dalam pelaksanaan kampanye menggunakan berbagai metode kampanye sesuai dengan regulasi PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum diantaranya yaitu Metode Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Penyebaran Bahan Kampanye, Penyebaran Alat Praga Kampanye dan Kegiatan lainnya seperti Bansos, Bazaar dan pengobatan gratis. Di Kota Depok hanya satu metode dan Pentas Seni, juga terdapat metode kampanye Rapat Umum yang diselenggarakan di Kota Depok. Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan Pengawasan Kampanye dari mulai 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 dan hasil pengawasannya dituangkan dalam Laporan hasil pengawasan (LHP/Form A), adapun hasil pengawasan dalam kampanye yaitu sebagai berikut:

Rekap Jumlah Kampanye Per-Peserta Pemilu di Kota Depok:



No	Peserta Pemilu	Jumlah Kampanye
1.	CAPRES CAWAPRES 01	4
2.	CAPRES CAWAPRES 02	4
3.	CAPRES CAWAPRES 03	1
4.	DPD	0
5.	DPR RI	181
6.	DPRD PROVINSI	167
7.	DPRD KAB/KOTA	1158
JUMLAH		1.515

Rekap Jumlah Kampanye Per-Metode di Kota Depok:

No	Peserta Pemilu	Jumlah Kampanye
1.	PERTEMUAN TATAP MUKA	925
2.	PERTEMUAN TERBATAS	317
3.	KEGIATAN LAINNYA	168

4.	PENYEBARAN BK	105
JUMLAH		1.515

## 2. Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan Dana Kampanye menggunakan dua metode satu datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan yang kedua menganalisa serta memantau melalui SIKADEKA, adapun hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok yaitu:

### a. LADK

Tim fasilitasi pengawasan tahapan Kampanye Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan proses penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik se Kota Depok, yang mana sebelumnya ada surat pemberitahuan dari KPU Kota Depok dalam hal mengundang kepada Bawaslu Kota Depok perihal persiapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu. Komisioner KPU Kota Depok semuanya hadir serta mempersiapkan Tim Verifikator dari Kasubag dan Staf Pelaksana Teknis dalam hal memverifikasi berkas kelengkapan LADK sekaligus menjadi operator SIKADEKA. Kemudian Operator SIKADEKA dari masing-masing Partai Politik berdatangan hadir untuk melaporkan hasil Submit dan

Penyerahan Berkas LADK. Berdasarkan hasil pengawasan, berkas LADK yang diserahkan oleh masing-masing Partai Politik se-Kota Depok memuat:

- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
- 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye;
- 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran (Setiap Orang Calon Anggota Legislatif);
- 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye.

Dalam proses penyerahan berkas LADK tersebut semua Partai Politik ditetapkan status penyampaian semuanya di terima dengan catatan ada perbaikan. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan, kami memantauproses operator SIKADEKA KPU Kota Depok untuk memastikan setiap Partai Politik sudah Submit sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, adapun hasil pengawasan

dengan LHP nomor: 220/LHP/PM.01.02/01/2024 sebagai berikut:

Terkait penyampaian Laporan Awal Dana kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sampai dengan pukul 23.59 WIB dengan melakukan pengawasan Pencermatan di aplikasi SIKADEKA sebagai berikut:

Daftar Partai Submit s.d. batas waktu Pukul 23:59 WIB;

- 1) Partai UMMAT
- 2) Partai PKS
- 3) Partai NASDEM
- 4) Partai PPP
- 5) Partai GOLKAR
- 6) Partai PDI PERJUANGAN
- 7) Partai GERINDRA
- 8) Partai PERINDO
- 9) Partai BURUH
- 10) Partai PAN
- 11) Partai PKN

12) Partai DEMOKRAT

13) Partai PKB

14) Partai HANURA

15) Partai GELORA

16) Partai PSI

17) Partai PBB

Daftar Partai Submit s.d. batas waktu pada tanggal 7 Januari  
Pukul 23:59 WIB;

1) Partai Garuda.

Sehingga di simpulkan bahwa terdapat 1 (satu) partai politik peserta pemilu di Kota Depok, yakni Partai Garuda yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal tertuang di PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Akibatnya sebagaimana ketentuan bahwa dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kota Depok dengan Nomor: 05/PM.00.02/K.JB-16/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi:

- a) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang disampaikan sebagai berikut:
- b) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat Kota/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- c) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK

- sebagaimana dimaksud kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) LADK calonanggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- d) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- e) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenaisanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

**b. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)**



Laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain yakni perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun badan usaha non pemerintah atau disebut dengan LPSDK ini harus di laporkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dari tanggal 28 November 2023 hingga paling lambat tanggal 11 Februari 2024. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok berkenaan dengan LPSDK ditemukan bahwa dari 17 partai politik yang menyampaikan LADK tidak ada satu pun partai politik yang ada sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun badan usaha non pemerintah.

**c. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)**

Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Depok dengan Nomor:98/PM.00.02/K.JB-16/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi:

- 1) Memperhatikan jadwal penyampaian pelaporan LPPDK kepada KPU Kota Depok yaitu dimulai dari tanggal 23 Februari 2024 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 WIB.
- 2) Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),

memastikan kesesuaian terkat informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Melakukan Pembukuan dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memastikan:

- a) Dana Kampanye pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.

Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Kepada KPU Kota Depok dengan Nomor: 99/PM.00.02/K.JB-16/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi:

4) Mematuhi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pembukuan dan pelaporan dana kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

diantaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye yang meliputi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periodewaktu yang telah ditentukan;

- 5) Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK);
- 6) Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi peserta pemilu;
- 7) Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
- 8) Apabila terdapat kendala dalam SIKADEKA maka Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tetap memberikan ruang untuk pelaporan secara offline dengan cara datang ke kantor KPU Kota Depok.

Bawaslu Kota Depok melakukan Pengawasan LPPDK tersebut dilakukan melalui akses Akun SIKADEKA Bawaslu Kota Depok. Dalam proses pencermatan tersebut saya memastikan Partai Politik se-Kota Depok harus sudah melakukan penyampaian laporan online/Submit

di masing-masing Partai Politik. Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan bahwasannya tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 adalah batasan waktu terakhir Partai Politik harus sudah melakukan penyampaian online/submit Laporan Pengeluaran dan Pendapatan Dana Kampanye (LPPDK).

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, hasil pencermatan pada akun SIKADEKA Bawaslu Kota Depok Partai Politik yang sudah melakukan Submit LPPDK dan proses laporan status penerimaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebagai berikut:

No	No Parpol	Partai Politik	Waktu Submit	Status
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	29/02/2024 17:23:39 WIB	Lengkap
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	26/02/2024 19 :55:04 WIB	<b>Lengkap</b>
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	26/02/2024 13:48:00 WIB	<b>Lengkap</b>
4	4	Partai GolonganKarya	28/02/2024 16 :29:15 WIB	<b>Lengkap</b>
5	5	Partai Nasdem	29/02/2024 23:57:42 WIB	<b>Lengkap</b>
6	6	Partai Buruh	28/02/2024 19:02:24 WIB	<b>Lengkap</b>
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	29/02/2024 15 :28:51 WIB	<b>Lengkap</b>

8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	28/02/2024 23:48:42 WIB	Lengkap
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	29/02/2024 20:15:42 WIB	Lengkap
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	23/02/2023 11:27:35 WIB	Lengkap
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	28/02/2023 23:56:24 WIB	Lengkap
12	12	Partai Amanat Nasional	28/02/2024 17:38:44 WIB	Lengkap
13	13	Partai Bulan Bintang	28/02/2024 19:29:02 WIB	Lengkap

14	14	Partai Demokrat	28/02/2024 20:16:17 WIB	<b>Lengkap</b>
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	28/02/2024 01:26:11 WIB	<b>Lengkap</b>
16	16	PARTAI PERINDO	28/02/2024 19 :56:39 WIB	<b>Lengkap</b>
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	28/02/2024 15:30:58 WIB	<b>Lengkap</b>
18	24	Partai Ummat	27/02/2024 13:39:47 WIB	<b>Lengkap</b>

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kasubag Teknis KPU Kota Depok pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 bahwa KPU Provinsi mengintruksikan bahwa ada Berita Acara penerimaan LPPDK yang harus di unlock/dibuka terlebih dahulu verifikasi yaitu Partai Golongan Karya di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, seluruh Partai Politik se-Kota Depok sudah melakukan submit LPPDK sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan.



a. Pengawasan Masa Tenang

Bawaslu Kota Depok dalam masa tenang melakukan berbagai bentuk kegiatan yaitu:

- 1) Pada tanggal 09 Februari 2024 Bawaslu Kota Depok memberikan himbauan Surat Imbauan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Depok dengan Nomor: 69/PM.00.02/K.JB- 25/02/2024 tanggal 09 Februari 2024 dan Surat Imbauan Ke Pimpinan Media Massa/Cetak/Elektronik di wilayah Kota Depok Nomor: 70/PM.00.02/K.JB-25/02/2024 tanggal 09 Februari 2024;
- 2) Pada tanggal 10 Februari 2024 Bawaslu Kota Depok melakukan Apel siaga dan deklarasi pemilu damai bersama dengan jajaran Bawaslu sampai Panwaslu Kecamatan Se-Kota Depok, Partai politik, TNI, POLRI dan Stake Holder dilingkungan Pemerintah Kota Depok, hal ini bertujuan supaya terciptanya pemilu yang damai, tanpa money politik, tanpa hoax dan tanpa politisasi sara terutama dimasa tenang pemilu tahun 2024;
- 3) Dihari pertama masa tenang yaitu tanggal 11 Februari 2024 setelah selesai melaksanakan apel siaga Bawaslu Kota Depok beserta dengan Satpol PP dan Dishub melakukan



penertiban APK disepanjang jalan Kota Depok;

- 4) Pelaksanaan Penertibatan APK dimulai sejak tanggal 11 s.d tanggal 13 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Jenis APK	Jumlah
1.	Baligho	1758
2.	Spanduk	2148
3.	Banner	26136
4.	Billboard	50
5.	Bendera	7570
<b>Jumlah</b>		<b>37.662</b>

- 5) Pada masa tenang Bawaslu Kota Depok melaksanakan patroli *money politic* keberbagai wilayah kecamatan di Kota Depok bersama sentra Gakkumdu Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Depok.

c) Proses dan Upaya Pencegahan

Salah satu tugas Bawaslu yaitu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa dalam setiap tahapan, oleh sebab itu Bawaslu Kota Depok dalam tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan yaitu:

- 1) Bawaslu Kota Depok telah melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan

Partai Politik Peserta Pemilu se-Kota Depok sebelum dimulainya masa kampanye yang pada pokoknya menyampaikan mari kita jagasama-sama penyelenggaran kampanye dengan tertib, aman, tanpa adanya politisasi sara, *hoax*, ujaran kebencian, jangan melibatkan pihak-pihak yang dilarang serta tidak menggunakan *money politic*.

2) Bawaslu Kota Depok juga telah memberikan berbagai Imbauan Kampanye dan Dana Kampanye diantaranya:

i) Program/Kegiatan Pembukaan RKDK

- Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 179/LHP/PM.01.02/11/2023 pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya: Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan Untuk memastikan pelaksanaan pendaftaran Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, RKDK dan Akun Media Sosial Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan KPU Kota Depok terkait Pendaftaran Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, RKDK, Akun Media

sosial Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pada hari Minggu, 26 November sudah ada 17 Partai Politik peserta pemilu tahun 2024 di Kota Depok. yang sudah melakukan pendaftaran pelaksana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA mengupload formulir pendaftaran pelaksana kampanye (MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD Kota/KOTA) dan sudah ada 8 pelaksana kampanye yang melakukan pendaftaran pelaksana kampanye presiden dan wakil presiden tingkat Kota Depok (MODEL- KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

- Bahwa sampai dengan hari senin, 27 November 2023 sudah ada 5 partai politik yang melakukan pendaftaran pelaksana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA (mengupload formulir model pendaftaran pelaksana kampanye).
- Bahwa berdasarkan informasi dari KPU Kota Depok terkait akses aplikasi SIKADEKA untuk Bawaslu tingkat Kota masih menunggu informasi dari KPU RI.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari KPU Kota Depok Partai politik peserta pemilu belum melampirkan jadwal kampanye melalui aplikasi SIKADEKA.
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Depok



mengeluarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

- Partai Politik peserta pemilu tingkat Kota Depok sudah membuka RKDK dan sudah mengupload ke SIKADEKA terkait Nama dan Nomor Rekening.

ii. Program/Kegiatan Pembukuan RKDK

Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Kepada KPU Kota Depok dengan Nomor: 182/PM.00.02/K.JB-25/12/2023 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi:

- KPU Kota Depok agar aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Partai Politik peserta Pemilu Se-Kota Depok berkaitan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Umum terkait RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana *Kampanye*) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana *Kampanye*);
- Dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Dana

Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk mendapatkan akses SIKADEKA dalam melakukan pengawasan.

iii. Program/Kegiatan Periode Pembukuan LADK

Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kota Depok dengan Nomor: 05/PM.00.02/K.JB-25/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi:

- Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu



tingkat.pusat, tingkat provinsi, dan tingkat Kota/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum



hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.





## OUTLINE DESKRIPSI LAPORAN KINERJA KELEMBAGAAN BAWASLU KOTA DEPOKDALAM PROSES PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

### A. Manajemen Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota

#### Depok

##### 1. Prinsip Fokus

###### 1) Persiapan

Pengawasan logistik dalam konteks pemilu adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar, transparan, dan adil. Beberapa langkah persiapan yang dapat diambil untuk pengawasan logistik pemilu melibatkan berbagai aspek, diantaranya adalah dengan melakukan rapat internal Bawaslu Kota Depok kemudian rapat kerja teknis dengan panitia pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa se Kota Depok diantaranya:

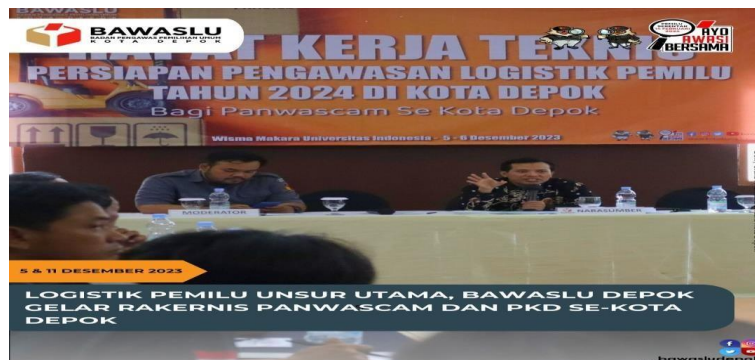
- a) Pada proses berjalannya tahapan logistik Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan rapat dalam kantor sebanyak 1 kali, peserta rapat yaitu Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Depok dengan narasumber eksternal dari KPU Kota Depok pada tanggal 24 November 2023. Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara logistik Pemilu 2024. Selain itu tujuan dari kegiatan ini berkenaan dengan regulasi, dan penyamaan persepsi terkait logistik Pemilu 2024. Bawaslu Kota Depok juga akan melakukan controlling terhadap apa yang dilakukan KPU dalam melaksanakan pengadaan dan pengelolaan logistik pemilu selalu berjalan beriringan

dengan aktifitas pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Bawaslu.



## 2) Proses

- b) Rapat Kerja Teknis Koordinasi Persiapan Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Depok (Fullboard) yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Desember 2023, dengan mengundang panitia pengawas kecamatan dan peserta external dari Polres Metro Depok. Pada pertemuan ini membahas tentang berbagai gambaran umum pengawasan logistik yang akan dilakukan, pola pengawasandan kondisi objektif kebutuhan pemilu tahun 2024 serta strategi pengawasan pemilu yang perlu disampaikan kepada peserta rapat yang merupakan perangkat utama dalam pemilu. Selain itu tujuan dari kegiatan ini sebagai sarana transparansi kinerja kelembagaan Bawaslu yang memiliki komitmen penuh terhadap proses pengawasan yang dilakukan secara penuh waktu dan melekat;



- c) Rapat Kerja Teknis Koordinasi Persiapan Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Depok (Fullboard) yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2023, dengan mengundang Pengawas Kelurahan/Desa dan peserta external dari Polres Metro Depok. Pemahaman pengawasan logistik sangat diperlukan bagi panitia pengawasan tingkat kelurahan (PKD) dan diutamakan, karena hal itu menjadi fokus utama pengawasan



## 2. Prinsip Kerja Kolegial

Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Logistik memiliki fungsi dan tugas yang dilaksanakan secara bersama-sama atas segala Keputusan yang dibuat oleh pimpinan secara kolektif kolegial. Poin-poin pembahasan yang perlu dilakukan dalam pola pengawasan logistik ini merupakan sebuah aturan yang perlu ditaati sesuai dengan regulasinya. Berkenaan efektifitas dari pembagian tugas pengawasan logistik sudah cukup ideal, namun ada beberapa hal yang seharusnya dirumuskan oleh pembuat kebijakan karena akan berkaitan efisiensi tugas dan tahapan yang berjalan secara beririsan.

Kemudian fungsi pleno mingguan sangat diperlukan dalam membuat sebuah kebijakan yang perlu dibuat oleh pimpinan dalam pengelolaan

pengawasan tahapan logistik. Karena pleno disebutkan sebagai sarana pengambilan Keputusan akan sangat berpengaruh terhadap segala kebijakan pengawasan yang dihadirkan dalam melakukan pengawasan secara melekat. Selain itu efektifitas pleno juga dapat digunakan untuk sarana evaluasi tentang hasil kinerja pengawasan yang sudah dilaksanakan dan mampu menjadi acuan untuk pengawasan tahapan logistik yang akan datang. Pola-pola inilah yang akan menggerakkan Tim Fasilitasi untuk melaksanakan pengawasan yang efektif ke depannya.

### 3. Prinsip Akuntabilitas

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan tahapan logistik, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan beberapa hal yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Imbauan, Bawaslu Kota Depok telah memberikan surat Imbauan kepada KPU Kota Depok Perihal letak dan keamanan Gudang KPU Kota Depok, Imbauan tentang rekrutmen calon petugas sortir lipat agar bebas dari keanggotaan partai politik dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan sortir lipat;
- b) Pengawasan melekat pada tahapan pendistribusian logistik Tahap I, Tahap II, perakitan kotak suara dan Sortir Lipat Surat Suara
- c) Saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Depok kepada KPU Kota Depok perihal ketelitian dalam metode penyortiran yang dilakukan oleh petugas dan Saran Perbaikan terkait tempat dan jam kerja petugas sortir lipat.

#### 4. Prinsip Transparansi

##### a) Kualitas dan Kuantitas Publikasi Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan bawaslu telah melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal. Karena koordinasi merupakan hal penting dan perlu dilakukan dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kota Depok juga selalu mempublikasikan kegiatan persiapan dan pengawasan Logistik yang telah dilakukan di akun sosial media yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Depok.

##### b) Kualitas dan Kuantitas Publikasi Proses Pengawasan

Proses pengawasan yang sudah dilaksanakan selalu terekam dalam media online lokal dan nasional. Terdapat delapan berita diantaranya 8 media online.

#### **Bawaslu Depok Awasi Pendistribusian Logistik Pemilu 2024, Mulai Dari Gudang Hingga Ke TPS**



Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah

#### 5. Dukungan Sekretariat

Dukungan sekretariat dalam melakukan pengawasan logistik sudah cukup baik dengan memfasilitasi kegiatan pengawasan yang dijadwalkan pada tahapan logistik. Selain itu dalam hal penjemputan surat suara pun sekretariat mendukung secara administratif agar pimpinan dan staf pelaksana teknis dapat melakukan pengawasan ke

pabrik percetakan surat suara.

a) Dukungan SDM

Secara prinsip dukungan SDM yang dilakukan oleh sekretariat Bawaslu secara penuh dan total. Hal ini terlihat dari pejadwalan pengawasan yang dilakukan melibatkan semua unsur pimpinan hingga staf pelaksana teknis secara bergantian melakukan pengawasan Logistik.

b) Dukungan Anggaran

Pada sisi dukungan anggaran , sekretariat melakukan dukungan secara penuh dengan memberikan dukungan perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota dalam upaya mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan logistik.

c) Dukungan Sarana/Prasaran

Secara prinsip dukungan sarana prasarana dilakukan oleh kesekretariatan Bawaslu Kota Depok secara penuh. Seperti menyediakan akomodasi dan transportasi untuk melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

**B. Pengawasan Logistik Tahap I**

1. Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu Tahap I

No	Logistik Tahap I	Terpenuhi (%)	Terdapat Kekurangan (%)	Terdapat Kerusakan/Cacat (%)
1.	Kotak suara	100%	Tidak	
2.	Bilik Suara	100%	Tidak	
3.	Tinta	100%	Tidak	
4.	Kabel Ties	100%	Tidak	
5.	Segel	100%	Tidak	

2. Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Tahap I

a) Proses Pengadaan Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Depok	Pada proses pengadaan logistik tahap I, Bawaslu Kota Depok dalam melakukan pengawasan mengalami keterbatasan dalam mengakses silog. Karena proses pengadaan logistik semuanya melalui Silog dan Bawaslu Kota Depok tidak mempunyai akses Silog, hanya diberitahu saja oleh KPU.	-	-

b) Hasil Pengadaan Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Depok	1. Hasil pengawasan pengadaan logistik yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok setelah melakukankoordinasi dengan KPU Kota Depok kami memandang bahwa dalam hal pengadaan untuk informasi kebutuhan logistik yang akan digunakan dalam pemilu sangat terbatas aksesnya. karena segala bentuk mulai dari perencanaan dan hasil pegadaan logistik terpusat pada silog KPU.	-	-

c) Distribusi Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Depok	1. dalam tahapan distribusi logistik Tahap I yang diterima oleh KPU Kota Depok kami telah melakukan pengawasan secara melekat pada setiap logistik yang diterima oleh KPU Kota Depok. Yang diantaranya adalah Bilik Suara, Kotak Suara, Tinta, Kabel Ties, Segel,	-	-

	<p>2. Adapun dari hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan diketahui data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bilik suara yang sudah diterima sejumlah 22.280 set</li> <li>b. Kotak Suara yang sudah diterima sejumlah 27.872 set</li> <li>c. Tinta yang sudah diterima sebanyak 11.140 buah</li> <li>d. kabel Ties yang sudah diterima sebanyak 144.820 buah</li> <li>e. Segel yang sudah diterima sebanyak 534.909 buah</li> </ul>	-	-
--	---	---	---

### 3. Kendala Pengawasan Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Kendala Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Depok	<p>1. berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Depok terdapat kendala dalam hal timeline atau jadwal pengiriman logistik karena tidak ada kejelasan dari pihak KPU Kota Depok. Sehingga dalam melakukan pengawasan dilakukan secara mendadak dan tidak bisa diketahui secara pasti waktu dan hari kedatangan Logistik ke gudang KPU.</p>	-	-
	<p>2. berkenaan dengan kebutuhan per item logistik tidak dapat dipastikan tentang jumlah kebutuhan secara pasti karena tidak diberikan akses silog atau hasil pengadaan yang telah dilakukan. Sehingga pengawasan melekat yang dilaksanakan hanya mengawasi jumlah logistik yang datang ke gudang dan kondisinya saja.</p>	-	-

### C. Pengawasan Logistik Pemilu Tahap II

#### 1. Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Tahap II

##### a) Keterpenuhan Distribusi Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota

Nama Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Distribusi Surat Suara KeKPU Kab/Kota		Progres Sudah Tiba(%)	Keterangan (Sebab Belum/Belum Tiba)	Tindak Lanjut
		SudahTiba	Belum/BelumTiba			
Kota Depok	Surat Suara Presiden 1.423.760	√	-	100%	-	-
	Surat Suara DPR RI 1.423.760	√	-	100%	-	-
	Surat Suara DPD 1.423.760	√	-	100%	-	-
	Surat Suara DPRD Provinsi 1.423.760	√	-	100%	-	-
	Surat Suara DPRD Kota 1.423.760	√	-	100%	-	-

##### b) Kendala Pengawasan Logistik Tahap II

Dalam hal pengawasan Logistik Tahap II kendala utama yang dihadapi masih sama seperti Tahap I yaitu kendala dalam hal timeline atau jadwal pengiriman logistik karena tidak ada kejelasan dari pihak KPU Kota Depok. Kemudian dalam hal pendistribusian surat suara kendala yang dihadapi yaitu armada pengangkut surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi dari Semarang menuju Gudang KPU Kota Depok mengalami ban kempes dan armada yang digunakan usianya cukup tua sehingga pendistribusian terhambat.



Pada pengadaan surat suara DPD RI pemberitahuan dari KPU sedikit terlambat dan proses distribusi ke gudang KPU Kota Depok hanya menunggu kedatangan saja karena sudah di kawal oleh Pihak polda Metro.

**D. Pengawasan Proses Sortir, Lipat, dan Pengepakan Logistik Pemilu Tahap I dan Tahap II oleh KPU Kabupaten/Kota**

- a. Pada hari kedua pelaksanaan sortir lipat KPU Kota Depok langsung melakukan penyortiran dan pelipatan hingga dini hari dan para petugas tidak disediakan tempat yang memadai sehingga berpotensi akan banyaknya surat suara rusak saat pengerjaan sortir lipat.
- b. Dalam melakukan proses pengawasan pada saat penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 20 Januari 2024. Adapun data hasil sortir lipat yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Jenis PPWP dari total 1.420.338 lembar yang dilipat, terdapat 70 lembar surat suara yang rusak, jumlah tersebut masih terdapat kekurangan sebanyak 3.422 Surat Suara dari jumlah yang dibutuhkan;
  - 2) Jenis DPR RI Jawa Barat dari total 1.431.617 lembar yang terlipat terdapat 1.287 lembar surat suara yang rusak, Jumlah tersebut terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 6.857 dari jumlah yang dibutuhkan;
  - 3) Jenis DPD RI dari total 1.423.601 lembar yang dilipat, terdapat 1.333 lembar surat suara yang rusak, jumlah tersebut masih terdapat kekurangan sebanyak 159 Surat Suara dari jumlah yang dibutuhkan;

- 4) Jenis surat suara DPRD Provinsi dari total 1.423.992 lembar yang dilipat, terdapat 1.574 lembar surat suara yang rusak, Jumlah tersebut terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 232 dari jumlah yang dibutuhkan;
  - 5) Jenis surat suara DPRD Kota Depok sebanyak 6 Dapil dari total surat suara 1.454.016 lembar, terdapat 128 lembar surat suara yang rusak.
- c. Bawaslu Kota Depok pada saat melakukan tugas pengawasan menemukan adanya petugas yang melakukan penyortiran secara tidak teliti sehingga dikhawatirkan surat suara yang rusak dan cacat tidak tersortir dengan baik. Kemudian kebanyakan petugas KPU yang berada dalam gudang tidak memperhatikan atau melakukan pengawasan sortir lipat yang dilakukan oleh Petugas sortir lipat.

#### **E. Kendala Pengawasan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan**

- 1) Pada pengadaan surat suara DPR dan DPRD Provinsi di PT. Masmedia Buana Pustaka warna partai politik peserta pemilu terlihat berbayang dan tidak sesuai dengan warna aslinya. Namun Ketika ditanyakan ke pihak pabrik dan KPU RI hal ini sudah dilakukan perbaikan 3 kali dan hasilnya sama, sehingga masih digunakan.
- 2) Dalam proses sortir lipat banyak staf KPU Kota Depok yang berada digudang tidak melakukan pengawasan terhadap proses sortir yang dilakukan petugas sorlip sedangkan Bawaslu Kota Depok sendiri keterbatasan dalam jumlah personil dibandingkan dengan Petugas sorlip yang jumlahnya sekitar 500 orang lebih. Kemudian hal tersebut berimbas kepada petugas yang



melakukan sortirlipat banyak ditemukan yang tidak melakukan penyortiran secara teliti.

#### **F. Persiapan dan Fokus Pengawasan Tahapan Logistik untuk Sub Tahapan Sisa**

Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam logistik. pada jajaran internal, Bawaslu Kota Depok melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan logistik yang sudah dilaksanakan. Dalam tahapan logistik yang belum dilaksanakan yaitu pengesetan surat suara hingga pendistribusian sampai Tingkat TPS,

Bawaslu Kota Depok melibatkan Panwaslu Kecamatan mulai dari Pengesetan di Gudang KPU Kota agar masalah yang akan muncul bisa teridentifikasi lebih awal. Kemudian dalam hal eksternal Bawaslu Kota Depok berkoordinasi secara intens tentang jadwal dan tahapan logistik yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian prosedur dan daftar masalah yang berpotensi muncul.

#### **G. Kesimpulan dan Rekomendasi**

##### **1. Kesimpulan**

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam hal tahapan logistik, telah dilakukan sebagaimana amanat Undang-undang pemilu yang diuraikan dalam Perbawaslu 5 Tahun 2022. Kemudian aturan teknis yang dijadikan pedoman tentu bersumber dari PKPU 16 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1395. Untuk itulah dalam menjalankan tugas pengawasan kami selalu mengedepankan prinsip pencegahan ketika timbul permasalahan yang terjadi.



Logistik ini merupakan sebuah hal vital yang tidak dapat dipandang sebelah mata, tanpa adanya logistik tentu pemilu tidak akan berjalan dengan baik dan hak pilih para pemilih tidak akan terpenuhi dengan baik. Secara garis besar banyak permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024 tetapi setiap permasalahan yang muncul Bawaslu Kota Depok akan selalu memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan seperti memberikan saran perbaikan dan imbauan. Kemudian terkait Pengadaan Logistik yang menggunakan silog Bawaslu kesulitan dalam mengawasi karena tidak mendapatkan akses, sehingga untuk memastikan jumlah kebutuhan logistik pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 cukup sulit dilakukan dan mengalami keterbatasan. Kondisi ini merupakan masalah Bersama dalam mengawasi tahapan logistik karena tidak hanya terjadi di Kota Depok saja.

## **2. Rekomendasi**

Berdasarkan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan di lapangan terkait logistik terdapat saran atau masukan yang bisa dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Permohonan akses silog dalam Upaya peningkatan kualitas pengawasan pada tahapan proses pengadaan, jumlah pengadaan logistik pemilu;
- b. Model pengawasan yang diterapkan harus dapat memprediksikan permasalahan yang mungkin timbul pada proses pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan logistik sehingga dalam tahap awal perlu ada pembahasan masalah yang akan muncul dan tertuang dalam DIM yang





dibuat untuk kabupaten/kota sehingga menjadi panduan/patokan pengawasan yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA DEPOK.**

**A. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILU 2024**

Pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 dalam lampiran I tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pada tabel program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 di sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 15 Februari 2024. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 memerlukan koordinasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif

dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan proses ini dapat berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, sehingga hasil pemilu yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Bawaslu Kota Depok terus berkoordinasi dengan KPU Kota Depok, Polres Metro Depok, DANDIM 0508 Kota Depok, dan Pemerintah Kota Depok guna memastikan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar. Bawaslu Kota Depok beserta jajaran turut melakukan sosialisasi terhadap peraturan Bawaslu dan Peraturan lainnya, memetakan dan menginventarisir kendala yang mungkin saja terjadi pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

**a. Kerawanan-kerawanan**

Sesuai dengan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu”. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Depok secara bersama-sama melakukan pemetaan dan inventarisasi masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Diantaranya, yaitu;

1. Pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU melalui KPPS (Model C.Pemberitahuan-KPU),



2. Tidak di diumumkannya Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS,
3. Tidak menandai pemilih yang meninggal dunia setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap di papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS,
4. Tempat Pemungutan suara tidak strategis serta tidak memperhatikan pemilih ramah disabilitas,
5. Pendistribusian logistik terlambat datang ke TPS,
6. Terdapat kekurangan surat suara sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS,
7. Tertukarnya surat suara antar Daerah Pemilihan,
8. Penggunaan atribut salah satu peserta pemilu oleh saksi atau pemilih,
9. Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) berdekatan dengan posko pemenangan salah satu peserta pemilu,
10. Banyaknya jumlah pemilih yang berstatus daftar pemilih khusus (DPK) melebihi tambahan 2% surat suara di setiap TPS,
11. Terdapat pemilih yang berstatus daftar pemilih khusus (DPK) dalam menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan/desa dalam KTP-el,
12. Adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh pendukung salah satu peserta pemilu untuk memilih calon tertentu,
13. Adanya money politik pada saat pelaksanaan pemungutan suara,
14. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali,



15. Pembukaan tempat pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS melebihi pukul 07.00 WIB,
16. Terdapat saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari peserta pemilu.
17. Saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat melihat proses penghitungan suara di TPS.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kota Depok dalam melakukan rencana pengawasan melakukan beberapa agenda untuk optimalisasi langkah dan strategi dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan yang tepat, diantaranya yaitu:

##### **1. Apel Siaga**

Apel Siaga dalam rangka persiapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sebagai simbol bahwa Bawaslu siap mengawasi tahapan yang akan berlangsung. Dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok hingga Pengawas Kelurahan/Desa bersama dengan stakeholder, forkopimda, dan yang lainnya.

##### **2. Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas**

Dalam agenda dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kota Depok turut melakukan kegiatan Rapat Dalam Kantor untuk peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu



Kota Depok, Rapat internal jajaran menjadi point penting dalam melakukan rencana atau strategi dalam melakukan pengawasan yang matang untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan untuk membantu memudahkan jajaran dalam mengaplikasikan data hasil pengawasannya.

### 3. Melakukan Supervisi

Supervisi ini penting dilakukan sebagai upaya Bawaslu Kota Depok dalam melakukan persamaan persepsi terhadap langkah apa yang akan diambil jika terjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2024. Turut mensosialisasikan Alat Kerja turunan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Alat Kerja Bawaslu Kota Depok dalam hal pengisian. Kemudian terkait laporan akhir pengawasan, Bawaslu Kota Depok juga menginstruksikan kepada jajaran Panwascam untuk merekam semua kejadian yang ada pada saat di TPS.

### 4. Patroli Pengawasan

Patroli Pengawasan dilakukan Bawaslu Kota Depok hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengoptimalkan dan memastikan pencegahan akan terjadinya hal-hal yang



disebutkan dalam kerawanan-kerawanan yang sudah dipetakan. Membentuk tim Patroli Pengawasan dan membagi kesetiap Wilayah yang ada di Kota Depok.

## **B. KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024**

### **1. Pencegahan**

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam hal Pencegahan kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kota Depok, kemudian kepada peserta Pemilu, dan juga Pemerintah Kota Depok dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan juga sebagai bentuk tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada setiap tahapannya. Memberikan Surat Imbauan, melakukan sosialisasi secara masif.

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 tentu menjadi keingin masyarakat banyak. Bukan hanya pada satu tahapan, melainkan semua tahapan sudah menjadi tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok memberikan rekomendasi berupa saran perbaikan langsung terhadap apa yang terjadi pada saat rapat pleno tersebut.



Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan bebas dari kecurangan, sehingga hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak dan mencerminkan kehendak rakyat.

## 2. Aktifitas Pengawasan

Dalam aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok, terbagi kedalam beberapa agenda seperti Apel Siaga oleh Bawaslu Kota Depok dan jajarannya, kemudian melakukan Patroli Pengawasan pada saat masa tenang, selanjutnya Pengawasan melekat pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Aktivitas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 melibatkan berbagai tahap dan aspek yang harus diawasi secara ketat untuk memastikan proses berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Berikut adalah rincian aktivitas pengawasan pada setiap tahap tersebut:

### a) Sebelum Hari Pemungutan Suara

Persiapan dan Sosialisasi: Pelatihan Pengawas: Mengadakan pelatihan bagi petugas pengawas pemilu untuk memastikan mereka memahami peraturan, prosedur, dan standar pengawasan.



Distribusi Logistik: Mengawasi distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan peralatan lainnya, untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau kerusakan.

b) Hari Pemungutan Suara

Pengawasan TPS: Pendirian TPS: Memastikan bahwa TPS didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap digunakan sebelum pemungutan suara dimulai.

Pemeriksaan Identitas Pemilih: Memastikan bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS adalah pemilih yang sah dengan memeriksa identitas dan kesesuaian dengan daftar pemilih tetap (DPT).

Proses Pemungutan Suara: Mengawasi jalannya proses pemungutan suara untuk memastikan tidak ada intimidasi, pemilih ganda, atau praktik kecurangan lainnya.

Kerahasiaan Pemilih: Memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara rahasia tanpa adanya tekanan atau intervensi.

c) Penghitungan Suara

Pengawasan Penghitungan Suara di TPS:

Proses Penghitungan: Mengawasi penghitungan suara di TPS yang dilakukan setelah pemungutan suara selesai. Semua pengawas harus memastikan bahwa proses ini dilakukan



dengan transparan dan sesuai prosedur. Pencatatan Hasil: Mengawasi pencatatan hasil penghitungan suara di formulir resmi untuk memastikan akurasi. Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU Kabupaten/Kota: Pengumpulan Hasil: Memastikan hasil penghitungan suara dari setiap TPS dikumpulkan dengan aman dan transparan. Proses Rekapitulasi: Mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota untuk memastikan tidak ada manipulasi data.

d) Penetapan Hasil Pemilu Penetapan Hasil oleh KPU:

Verifikasi Data: Memastikan bahwa KPU melakukan verifikasi atas semua data yang diterima sebelum menetapkan hasil pemilu. Penanganan Sengketa: Mengawasi proses penanganan sengketa pemilu untuk memastikan keluhan dan laporan pelanggaran ditangani dengan adil dan cepat.

Pengumuman Hasil: Memastikan bahwa pengumuman hasil pemilu dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



e) Pasca Pemilu Evaluasi dan Laporan:

Evaluasi Proses: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan di masa depan. Pelaporan Hasil Pengawasan: Menyusun laporan resmi mengenai hasil pengawasan yang mencakup semua temuan dan rekomendasi untuk peningkatan proses pemilu berikutnya.

Faktor Penting dalam Pengawasan

Independensi dan Netralitas: Pengawas pemilu harus independen dan netral, tidak memihak kepada partai politik atau kandidat mana pun. Transparansi: Semua proses pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Keamanan: Menjaga keamanan semua data dan dokumen terkait pemilu untuk mencegah manipulasi atau kehilangan.

Kolaborasi: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, lembaga masyarakat sipil, dan media, untuk memastikan pengawasan yang efektif.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, diharapkan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.



**C. Hasil hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu 2024.**

Hasil yang didapat dari pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

**1. Hasil Pengawasan**

**a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 14 Februari 2024 di Kota Depok dikatakan berjalan sangan Kondusif, dan dicatat sebanyak 1.169.229 Pemilih menggunakan Hak Suaranya, dan terdapat 19.042 Suara dinyatakan tidak sah, dan jika dilihat pada hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Depok yang memenangi kontestasi ini adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR	474.643
2	H. PRABOWO SUBIANTO DAN GIBRAN RAKABUMING RAKA	531.114
3	H. GANJAR PRANOWO, SH., M.I.P. DAN PROF. Dr. H. M. MAHFUD MD	144.430



Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan Nomor Urut II unggul untuk di kota Depok dengan masing-masing calon mendapatkan persentase sebagai



#### **b. Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat**

Dalam Pemilihan Anggota Legislatif untuk tingkat Pusat dan Provinsi Kota Depok satu Dapil dengan Kota Bekasi, sehingga untuk jumlah Pemilih DPK harus sinkron dalam penghitungan Akhir pada tingkat Kota, dalam hal ini Kota Depok dan Kota Bekasi terdapat 6 Kursi yang di perebutkan di DPR RI, sehingga Jumlah Caleg pada Pemilihan Tahun ini sebanyak 108 Caleg dari 18 Partai peserta pemilu tahun 2024, adapun data perolehan suara setiap caleg dan partai sebagai berikut:



1) Partai Kebangkitan Bangsa

NO.	URAIAN		RINCIAN
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(18)
<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
A.1	1	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	23.129
A.2	1	H. SUDJATMIKO, S.T.	41.235
	2	ARSELAN RUSLAN, S.H., L.L.M.	4.225
	3	ZORA VIDYANATA, S.E., M.M.	7.761
	4	MOHAMAD FUAD, M.M.S.I.	7.599
	5	CUPLI RISMAN	372
	6	LAILI NUR FARIDATUS SHOLIAH, M.Pd.	1.371
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>85.692</b>

2) Partai Gerakan Indonesia Raya

A.1	2	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	46.515
A.2	1	Ir. H. NUROJI	45.717
	2	M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.	18.479
	3	LILIANA, S.Pd., M.Si.	12.400
	4	HAPOSAN PAULUS BATUBARA, S.H., M.H.	3.713
	5	Hj. ANA MUNDIANA, S.E., M.M.	4.757
	6	AGUNG HENDRADI KUSWARDJANTO K.	2.000
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>133.581</b>

3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A.1	3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	29.828
A.2	1	SUKUR H. NABABAN, S.T.	37.014
	2	RISA MARISKA, S.H., M.I.Kom.	15.308
	3	NADRAH IZAHARI, M.Kn.	7.233
	4	JAHYA D.A. TAMPEMAWA, S.Pd., S.H.	2.261
	5	HASDAN NOVER ZANDI	1.446
	6	Dr. ETIN NURHAETIN NINGRUM, S.Ag., M.M., M.Si.	3.590
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>96.680</b>



4) Partai Golongan Karya

<b>A.1</b>	<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>28.449</b>
<b>A.2</b>	<b>1</b>	RANNY FAHD ARAFIQ	108.783
	<b>2</b>	Dra. WENNY HARYANTO, S.H.	32.417
	<b>3</b>	NOFEL SALEH HILABI	12.541
	<b>4</b>	TANIA LAENA PUTRI, B.Sc.	13.577
	<b>5</b>	STEVEN IZAAC RISAKOTTA, S.E., S.H., M.H.	2.546
	<b>6</b>	ANNEKE SEPTIVONE, S.Sos., M.H.	868
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>199.181</b>

5) Partai Nasdem

<b>A.1</b>	<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>11.567</b>
<b>A.2</b>	<b>1</b>	IDRIS SANDIYA	20.468
	<b>2</b>	CHOKY SITOANG	14.332
	<b>3</b>	ANNE KANIA DEWI	1.503
	<b>4</b>	H. M. BAMBANG SUNARYO, S.H., M.H	2.571
	<b>5</b>	AYU ALWIYAH AL JUFRI	2.827
	<b>6</b>	DEDEN SIRAJUDIN, S.E.	702
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>53.970</b>

6) Partai Buruh

<b>A.1</b>	<b>6</b>	<b>Partai Buruh</b>	<b>6.395</b>
<b>A.2</b>	<b>1</b>	FURQON	1.490
	<b>2</b>	MUSTIYAH, S.H., M.H.	2.170
	<b>3</b>	VONNY DIANANTO, A.Md.	719
	<b>4</b>	MUHAMMAD AHYAR, S.E., S.H., M.Kn.	1317
	<b>5</b>	SEPRIAN FAIRNANTO, S.Kom.	452
	<b>6</b>	TUMPUAN HASIATI	455
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>12.998</b>



7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia

<b>A.1</b>	<b>7</b>	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	2.315
<b>A.2</b>	1	RATU RATNA DAMAYANI	3.242
	2	TB. DEDY MI'ING GUMELAR	2.216
	3	MUHITH	276
	4	EDY MUHAMMAD	327
	5	IMAN ROSYADI	221
	6	HERLIN ROMIAN SORMIN	98
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>8.695</b>

8) Partai Keadilan Sejahtera

<b>A.1</b>	<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	69.923
<b>A.2</b>	1	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	41.924
	2	H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si.	76.384
	3	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.	29.152
	4	Ir. H. SYAMSU HILAL, M.P.	5.247
	5	Dr. dr. Hj. TITI MASRIFAHATI, M.K.M., M.A.R.S.	15.996
	6	SURYA HADIPERMANA, S.E.	3.638
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>242.264</b>

9) Partai Kebangkitan Nusantara

<b>A.1</b>	<b>9</b>	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	914
<b>A.2</b>	1	IGNASIUS ELL RAHANKUBANG	584
	2	DIAN FARIZKA, S.H., M.H.	1.309
	3	ARUMNY ZAHROH	95
	4	HARI YULIANTO	77
	5	TOMSER SITANGGANG	126
	6	FERITEN NOVITA HAREFA	70
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>3.175</b>

10) Partai Hati Nurani Rakyat

<b>A.1</b>	<b>10</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	753
<b>A.2</b>	1	R. HARDIYANTO PRIJOKOESOEMO	404
	2	AMANDA DITRIA FEBIYANTI, S.H.	270
	3	Ir. TOGAR SIMANJUNTAK, S.H.	417
	4	ENNY MARYANI, S.H.	171
	5	RUDY IMANUEL, S.H.	129
	6	Drs. RAHMAT, M.Si.	86
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>2.230</b>



11) Partai Garda Republik Indonesia

<b>A.1</b>	<b>11</b>	<b>Partai Garda Republik Indonesia</b>					906
<b>A.2</b>	1	CUT AVIYANTI, S.E., M.M.					492
	2	FIRANTI					345
	3	CEH FARIZ HIDAYATULLAH					134
	4	MEGA KHARISMA KUSUMAWARNI					116
	5	MUKHSIN KILWO					64
	6	LUKI PRASETYA					138
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>						<b>2.195</b>

12) Partai Amanat Nasional

<b>A.1</b>	<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>					13.441
<b>A.2</b>	1	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.					47.494
	2	ROMY BARENO, B.A., M.A.					14.874
	3	ARI PRIBADI SETIADARMA					1.983
	4	DARWIN PURBA, S.Kom., M.M					1.153
	5	dr. WURI HANDAYANI, M.A.R.S					1.355
	6	MUHAMMAD ADITYA WARMAN					3.288
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>						<b>83.588</b>

13) Partai Bulan Bintang

<b>A.1</b>	<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>					905
<b>A.2</b>	1	RANDY BAGASYUDHA, S.Psi., M.I.P.					442
	2	ADHI DWIARI, S.T.					197
	3	EVI PRATIWI HANDAYANI, S.Sos.					364
	4	AGUS PURWANTO					161
	5	AKSIN ASYIK, S.Ked.					74
	6	FAUZIAH, S.H., M.H.					199
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>						<b>2.342</b>

14) Partai Demokrat

<b>A.1</b>	<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>					16.012
<b>A.2</b>	1	SIGIT RADITYA, M.I.S., M.A.					16.526
	2	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.					11.229
	3	REZA					1.958
	4	DYAH MENTARI PUTRI, S.Hum., M.I.Kom					11.008
	5	YAN RIZA BUDIMAN					447
	6	BUDI PURNOMO					2.981
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>						<b>60.161</b>



15) Partai Solidaritas Indonesia

<b>A.1</b>	<b>15</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>						20.621
<b>A.2</b>	1	SUSY RIZKY WIYANTINI						10.386
	2	SIGIT WIDODO, S.T., M.Si.						6.363
	3	DOADIBADAI						3.147
	4	Dr. E. HANDAYANI TYAS, S.H., M.Pd.						3.774
	5	FERRY LUMBAN GAOL						2.896
	6	Dr. MANOTAR TAMPUBOLON, S.H., M.H.						3.628
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>							<b>50.815</b>

16) PERINDO

<b>A.1</b>	<b>16</b>	<b>PERINDO</b>						3.982
<b>A.2</b>	1	VICKY PRASETYO						4.320
	2	Irjen. Pol. (Purn.) HERBERT P. SITOANG, S.H.						1829
	3	DEBORA DEBBY WAGE, S.Sos., M.Si						1045
	4	Drs. W ANWAR SIREGAR, M.Min.						413
	5	SATYANA LIANDO						244
	6	YENTI NUDDIN						479
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>							<b>12.312</b>

17) Partai Persatuan Pembangunan

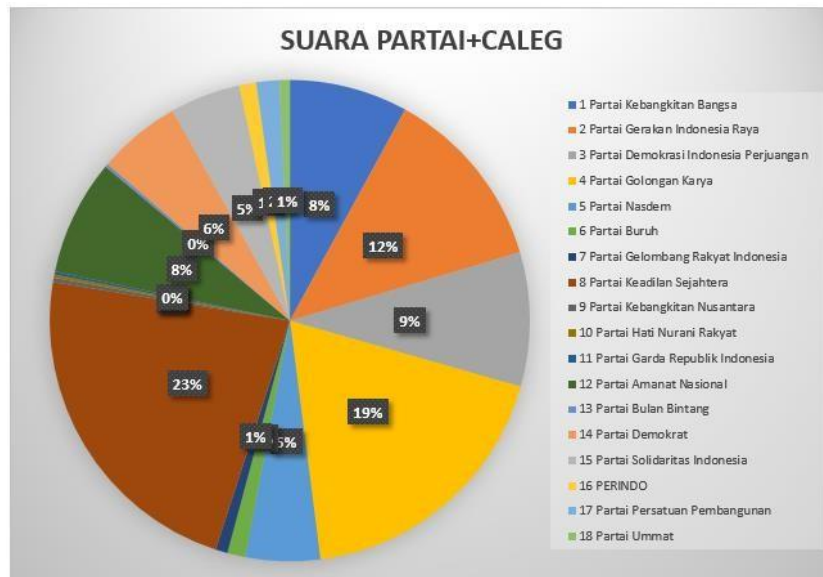
<b>A.1</b>	<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>						7.320
<b>A.2</b>	1	ADITYA HERPAVI RACHMAN						3.439
	2	SYAFA ILLIYIN B.						1.417
	3	H. IING HILMAN, S.E., M.M.						2.071
	4	HAMZAH HUSNI AL HAKIM						1.391
	5	CHAIRUNITA						763
	6	EDY SURYANTO						456
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>							<b>16.857</b>

18) Partai Ummat

<b>A.1</b>	<b>24</b>	<b>Partai Ummat</b>						2.729
<b>A.2</b>	1	Dra. EUIS FETY FATAYATY, M.Si.						1.864
	2	Dr. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.						1.006
	3	ISMAR SYAFRUDDIN, S.H., M.A.						446
	4	H. SOFI ERWANTO						604
	5	ERFIAN ZUFRI, S.E.						211
	6	MAYA SUHASNI SIREGAR, S.E.						406
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>							<b>7.266</b>



Jika dilihat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki suara sah caleg dan partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sebanyak 242.264 suara sah. Jika disimpulkan dalam bentuk persentase dapat dilihat pada diagram berikut ini;



Jika dilihat pada Persentase diatas, suara Partai Keadilan Sejahtera memiliki persentase tertinggi sebanyak 23% dan selanjutnya Partai Golkar dengan Persentase 12%.

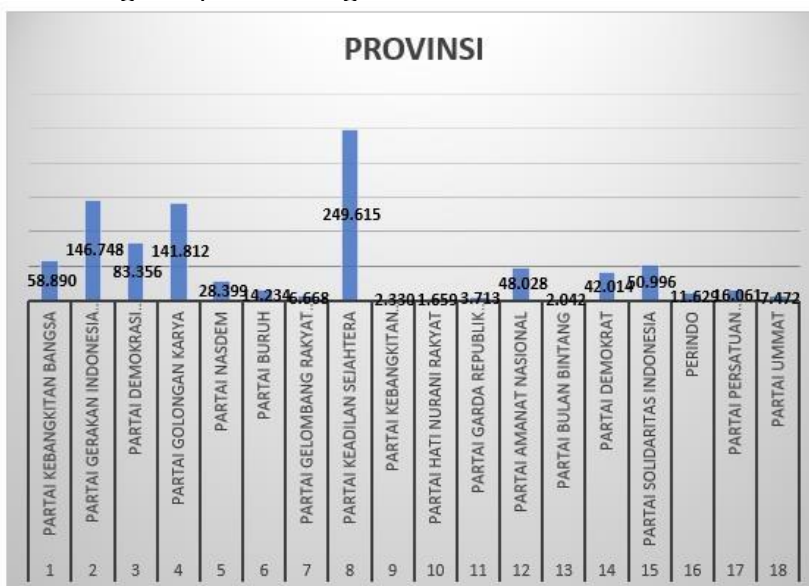
### c. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Pemilihan Anggota DPD Provinsi Jawa Barat terdapat sebanyak 54 Calon anggota Dewan yang memperebutkan 6 Kursi di senayan , untuk di kota depok sendiri dalam pemilihan ini terdapat satu calon yang sangat mencolok dalam perolehan suaranya yaitu Alfiansyah Komeng yang memiliki suara sebanyak 327.368 dan disusul oleh K.H Amang Syafrudin sebanyak 119.288 suara.



**d. Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Dalam Pemilihan Anggota Legislatif untuk tingkat Provinsi Kota Depok satu Dapil dengan Kota Bekasi, sehingga untuk jumlah Pemilih DPK harus sinkron dalam penghitungan Akhir pada tingkat Kota, dalam hal ini Kota Depok dan Kota Bekasi terdapat 11 Kursi yang di perebutkan di DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga Jumlah Caleg pada Pemilihan Tahun ini sebanyak 168 Caleg dari 18 Partai peserta pemilu tahun 2024, adapun data perolehan suara caleg dan partai sebagai berikut:



NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	58.890
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	146.748
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	83.356
4	Partai Golongan Karya	141.812
5	Partai Nasdem	28.399
6	Partai Buruh	14.234
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6.668
8	Partai Keadilan Sejahtera	249.615
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.330
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.659
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.713
12	Partai Amanat Nasional	48.028
13	Partai Bulan Bintang	2.042
14	Partai Demokrat	42.014
15	Partai Solidaritas Indonesia	50.996
16	PERINDO	11.629
17	Partai Persatuan Pembangunan	16.061
18	Partai Ummat	7.472

Jika dilihat dari diagram dan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki Perolehan Suara Terbanyak dibandingkan dengan partai lain.

#### e. Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok

Kota Depok dengan status sebagai penyanggah Ibukota dengan luas 200,29 KM<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk 1.927.867 Jiwa dengan jumlah DPT 1.393.282 dengan 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Depok bahwasannya Kota Depok dibagi menjadi 6 Daerah Pemilihan (DAPIL), adapun pembagian Dapil di Kota Depok sebagai berikut;

- 1) Daerah Pemilihan 1 : Kecamatan Pancoran Mas
- 2) Daerah Pemilihan 2 : Kecamatan Beji, Cinere, Limo
- 3) Daerah Pemilihan 3 : Kecamatan Cimanggis
- 4) Daerah Pemilihan 4 : Kecamatan Sukmajaya
- 5) Daerah Pemilihan 5 : Kecamatan Cilodong dan Tapos
- 6) Daerah Pemilihan 6 : Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Cipayung

Adapun Hasil dari Perolehan di setiap Dapil dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



### 1) Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Pancoran Mas

NO.	URAIAN		RINCIAN	
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN		KECAMATAN (...)	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON				
A.1	<b>1</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2.229	2.229
A.2	1	SULAIMAN	1.573	1.573
	2	AGUNG CANDRA	226	226
	3	HANI WARSITA	518	518
	4	SAROJIH, S.Sos.I.	1.541	1.541
	5	NASIR, S. T.	162	162
	6	LENNY INDRA	172	172
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		6.421	6.421
A.1	<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	4.557	4.557
A.2	1	H. EDI MASTURO, S.E.	10.333	10.333
	2	NOVI ANGGRIANI, S.M.	1.527	1.527
	3	ALI IMRAN AMIRULLAH	2.586	2.586
	4	DODY RIYANTO, S.Kom.	348	348
	5	FANNY L. LAURENS	319	319
	6	H. SUTISNA, S.H.	489	489
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		20.159	20.159
A.1	<b>3</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	3.252	3.252
A.2	1	HENDRIK TANGKE ALLO	6.003	6.003
	2	LUSIANA ATIKA	1.175	1.175
	3	ARIFIN SIDAURUK	1.252	1.252
	4	LINDA DAMAIRIA NAPITUPULU	620	620
	5	ACHMAD NISRAN SIREGAR, S.E.	319	319
	6	WINIE AYU LESTARI	322	322
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		12.943	12.943
A.1	<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	2.870	2.870
A.2	1	SUPRIATNI, S.Ag., M.M.	9.366	9.366
	2	KARMAN HERMANTO	2.023	2.023
	3	JAYADI	585	585
	4	ADHITYA RAAJ.S	217	217
	5	MEYSITA ARUM NUGROHO, S.H., M.Kn.	344	344
	6	WIRANANDA GOEMILANG, S.H.	2.356	2.356
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		17.761	17.761



<b>A.1</b>	<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>					1.047	1.047	
<b>A.2</b>	1	EKA HENDRAYANA, S.T.					1.006	1.006	
	2	MANGARANAP M SINAGA, S.E., M.H.					444	444	
	3	DIANA LOEN					161	161	
	4	NURYANAWATI, S.E.					179	179	
	5	DIDDY KURNIAWAN					244	244	
	6	ARIF BUDIMAN, S.H.					329	329	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							3.410	3.410

<b>A.1</b>	<b>6</b>	<b>Partai Buruh</b>					654	654	
<b>A.2</b>	1	TORBEN RANDO OROH					95	95	
	2	SRI SUSILOWATI, S.Kom.					194	194	
	3	NURTANTO, S.Pd.					151	151	
	4	MOHAMAD NUH, S.E., M.M.					131	131	
	5	RATIH HERWAHYUNINGTYAS, S.Pd.					85	85	
	6	SRI HANDAYANI					64	64	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							1.374	1.374

<b>A.1</b>	<b>7</b>	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>					213	213	
<b>A.2</b>	1	DENNY RIADY ALAM PRIBADI					84	84	
	2	ANTONI SUBAGIO, S.Sos.					106	106	
	3	INA SALEHA					122	122	
	4	IKSAN PITOYO					25	25	
	5	Dr. BRAMASTYO B. PRASTOWO, M.E.					176	176	
	6	RADEN DESIANTI NUR'AINI					23	23	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							749	749

<b>A.1</b>	<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>					7.165	7.165	
<b>A.2</b>	1	H. MOH. HAFID NASIR, Dipl.Inf.					9.968	9.968	
	2	H. IMAM MUSANTO, S.Pd., M.M.					8.162	8.162	
	3	DIAN NURFARIDA, S.Sos.					2.284	2.284	
	4	AL KHANSA MUJAHIDAH, S.M.					1.862	1.862	
	5	SYAIFUL HIDAYAT, SPD					1.787	1.787	
	6	KHAIRUL WAJDI, A.Md.					988	988	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							32.216	32.216

<b>A.1</b>	<b>9</b>	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>					45	45	
<b>A.2</b>	1	MARTHA ROSDIANA					68	68	
	2	MARSONO					65	65	
	3	JUNARSYAH					20	20	
	4	CHRISTIEN ANGGRAENI, S.E.					14	14	
	5	YULIANI. S					43	43	
	6	SUHENI, S.E.					5	5	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							260	260

<b>A.1</b>	<b>10</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>					54	54	
<b>A.2</b>	1	LUSYE JACOBUS, S.E					52	52	
	2	WARLIAH					16	16	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							122	122

<b>A.1</b>	<b>11</b>	<b>Partai Garda Republik Indonesia</b>						0	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							0	0

<b>A.1</b>	<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>					1.414	1.414	
<b>A.2</b>	1	IWAN ADRIANSYAH, S.E.					2.302	2.302	
	2	FITRI HARIONO, S.I.P.					2.724	2.724	
	3	PRIMANTI DANARSIH					233	233	
	4	RUBI HERMAWAN, S.T.					252	252	
	5	HERI SETIONO					946	946	
	6	SITI NENENG HASANAH, S.T.					115	115	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							7.986	7.986



<b>A.1</b>	<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>					99	99	
<b>A.2</b>	1	HENRY GUNAWAN ARIFIANTO, S.H.					43	43	
	2	DIAMOND JERRY HALOHO					19	19	
	3	DESTU PRADITA					12	12	
	4	CHARLY MANURUNG					7	7	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							180	180

<b>A.1</b>	<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>					1.401	1.401	
<b>A.2</b>	1	AGA PINANTARA, S.H., M.H.					2.912	2.912	
	2	SUKARJITO, S.H.					1.583	1.583	
	3	dr. SITI ISTIQOMAH					326	326	
	4	SRI MULYANI					379	379	
	5	WAHYUNINGTYAS INDAH WARDHANI, S.Kom., M.Si.M.					235	235	
	6	RADEN DIMAS SUGIHARTO					167	167	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							7.003	7.003

<b>A.1</b>	<b>15</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>					2.224	2.224	
<b>A.2</b>	1	AULIA ASKHA, S.Sos.					1.369	1.369	
	2	MARTHIN JONATHAN, S.E.					1.094	1.094	
	3	JORI ADRIAN NATAMA, S.I.Kom.					307	307	
	4	ELLY CORTINA ISAKH					273	273	
	5	ANTONIUS WAHYU KAMANDOKO, S.E., M.M.					489	489	
	6	AMSORI					173	173	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							5.929	5.929

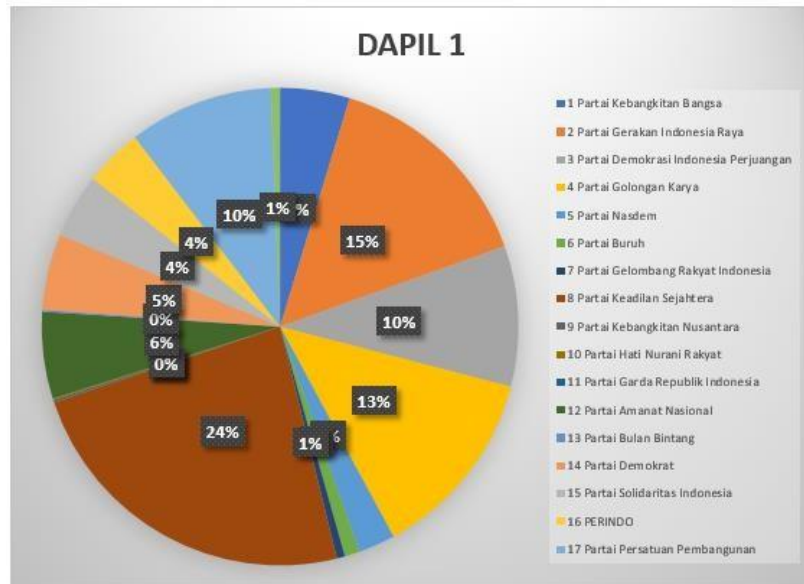
<b>A.1</b>	<b>16</b>	<b>PERINDO</b>					714	714	
<b>A.2</b>	1	RERE TATI SRI HARDINA, S.H.					4.035	4.035	
	2	YERRY P SIHOMBING, S.I.P.					189	189	
	3	ARI CAHYAWAN DWI PRASETYO					101	101	
	4	YURRI FERGRINA					100	100	
	5	NURSAIDA SINAGA					160	160	
	6	JOKO WIBOWO					61	61	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							5.360	5.360

<b>A.1</b>	<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>					1.622	1.622	
<b>A.2</b>	1	MAZHAB HM					10.451	10.451	
	2	PUSPITA RATNASARI					327	327	
	3	SITI NURJANAH					252	252	
	4	Hj. SRI HANDIARSIH, S.E.					228	228	
	5	TRI KUSUMAWATI, A. Md.					316	316	
	6	MURSID					146	146	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							13.342	13.342

<b>A.1</b>	<b>24</b>	<b>Partai Ummat</b>					313	313	
<b>A.2</b>	1	DANIEL SYUCHAYADI, S.H.					293	293	
	2	SRI PAMUNGKAS KUSUMA WIJAYANTI, S.E.					112	112	
	3	ANDRI SUHATRIL					37	37	
	4	SULASTRI					91	91	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>							846	846



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil satu yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 32.216 suara dengan persentase sebanyak 24%.



## 2) Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Beji, Cinere Limo

NO.	URAIAN	RINCIAN
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(18)
<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
A.1	<b>1 Partai Kebangkitan Bangsa</b>	3.194
A.2	1 RIFALDI	1.710
	2 TATI RACHMAWATI	3.149
	3 SYAHRUL AFFANDY	564
	4 FAHMI KHAI DIR	344
	5 ECY TUASIKAL	436
	6 HJ. FAUZH	994
	7 FIZKRY MAULANA	1.172
	8 RIZKY AFRIONO	195
	9 MIRANDA SELVY NASARI	87
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>11.845</b>



<b>A.1</b>	<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	6.125
<b>A.2</b>	1	H. MOHAMAD HB	5.363
	2	Hj. REZKY M. NOOR	4.327
	3	SURYADI	2.102
	4	MUHAMMAD SOLEH	944
	5	DARANTY	347
	6	M. SUTAN H.S.	366
	7	DEWI RATIH	567
	8	RAMDANY PRATAMA	378
	9	FAISAL WAHYUNIFAR	442
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>20.961</b>

<b>A.1</b>	<b>3</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	5.450
<b>A.2</b>	1	H. IMAM TURIDI	4.344
	2	HERMANTO	3.977
	3	SAHAT FARIDA BERLIAN	1.920
	4	VISNA VULOVIK	749
	5	CHRISTIAN PARLUHUTAN	1.211
	6	JESSE PHILIP HUTADJULU	2.060
	7	SITI REWY HANNA	616
	8	ERWIN MARCELUS SILALAH	550
	9	AHMAD TAMAMI HUSEIN	906
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>21.783</b>

<b>A.1</b>	<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	5.290
<b>A.2</b>	1	TAJUDIN TABRI	18.150
	2	MARTIAH	4.885
	3	MIHARJA GUNAPRIA	3.780
	4	NURCHOLIS SYAHBANI	1.831
	5	AHMAD RUDIYAT	350
	6	FAULIA MIRANDA	184
	7	SYAFIRA AYU NABILLA	215
	8	NGADIMAN	98
	9	SAMUEL BONARDO PARULIAN SITUMORANG	6.777
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>41.560</b>

<b>A.1</b>	<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>	1.805
<b>A.2</b>	1	MA'MUN ABDULLAH	1.976
	2	ROY PANGHARAPAN	1.386
	3	MOMBA DONNA SARI LUBIS	137
	4	HARIS FIRMANSYAH TANJUNG	264
	5	HERI ROMLI	373
	6	SORAYA	233
	7	AYOMI MAHAYU	107
	8	ZULFADLI	184
	9	SITI HERAWATI APRILIANA	147
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>6.612</b>

<b>A.1</b>	<b>6</b>	<b>Partai Buruh</b>	1.056
<b>A.2</b>	1	DITA PRASTIATY	510
	2	SUPARYATI	209
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>1.775</b>



<b>A.1</b>	<b>7</b>	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	441
<b>A.2</b>	1	SUBHAN	686
	2	MUHAMMAD HISYAM	130
	3	ISTIQOMAH S.Pd	399
	4	DERRY KURNIA S.A.	40
	5	DANIEL ADRIANUS BLATAN	42
	6	YULVITA SUMANTY	71
	7	RANJEETA ATMANEGARA	70
	8	OPU PANGERAN ALI ASYAM	61
	9	MUKTIYO LESTARI	30
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>1.970</b>

<b>A.1</b>	<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	9.852
<b>A.2</b>	1	T. FARIDA RACHMAYANTI	9.966
	2	H. T. M. YUSUFSYAH PUTRA	6.814
	3	UBAIDILAH	5.075
	4	SUKAIMIH	1.322
	5	Apt. NURUL HASANAH	3.342
	6	HENDRA	4.156
	7	YULI WASINI SANTOSO	671
	8	MUHAMMAD IZZUDDIN	2.841
	9	SETIYO BUDIYONO	360
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>44.399</b>

<b>A.1</b>	<b>9</b>	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	221
<b>A.2</b>	1	LUTFIAH MAELANI	77
	2	ANGGA DIPA BAHARI	13
	3	SYAHRIAL YASIN	18
	4	FITRIANI	24
	5	ULIL ALBAB	14
	6	SADAR JAYA	10
	7	HELVI SAFITRI	12
	8	AGUS SANTOSO	12
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>401</b>

<b>A.1</b>	<b>10</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	96
<b>A.2</b>	1	TONNY RANTI	65
	2	MIA BADRIYANI RANTI	24
	3	PUTRI HARLEYAR NANDAR ZEIN	59
	4	DINIYATI RANTI	12
	5	KHILDA MAYANG PUTRI	11
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>267</b>

<b>A.1</b>	<b>11</b>	<b>Partai Garda Republik Indonesia</b>	0
<b>A.2</b>	1		0
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>0</b>

<b>A.1</b>	<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	1.703
<b>A.2</b>	1	NURHASAN	4.936
	2	AFRIAN SETYOWATI	629
	3	MUHAMAD ISYA SYAFRUDDIN	334
	4	CEPI ZULKIFLI	328
	5	ANHAR	182
	6	LILI RAHMAYANTI	218
	7	SYAMIR ADAM	148
	8	PANDU WAHONO PUTRA	149
	9	YANI MULYANAH	104
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>8.731</b>



<b>A.1</b>	<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	142
<b>A.2</b>	1	MELKY SIDABUTAR	151
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>293</b>

<b>A.1</b>	<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	2.098
<b>A.2</b>	1	ADITYA WIRADI PUTRA	6.893
	2	WILDAN DAROJAT	623
	3	Dr. NADYA PRITA GEMALA	691
	4	SOLEHUDIN SETIAWAN	178
	5	BUDI HARTONO PAKPAHAN	184
	6	LENI KARMILA	306
	7	PRADANA MULYOYUNANDA	127
	8	SAYYIDAH MUSLIMAH	53
	9	PANDI AHMAD	1.117
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>12.270</b>

<b>A.1</b>	<b>15</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	3.802
<b>A.2</b>	1	ICUK PRAMANA PUTRA	1.490
	2	DANIEL RUDI T SIANTURI	790
	3	KARMILA SARI	947
	4	BINTON JHONSON NADAPDAP	1.771
	5	ANITA LINAWATI SHIRANCE BONITA	554
	6	ANGGIT DWI NUGROHO	273
	7	MAWARLINA BR MANULLANG	210
	8	HENDRA KERIA HENTAS	309
	9	MARSELIOUS ROMBE BAAN	164
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>10.310</b>

<b>A.1</b>	<b>16</b>	<b>PERINDO</b>	621
<b>A.2</b>	1	TEGUH ONOH	203
	2	FARIDA ARYANI	179
	3	I MADE MARTASANDHI	203
	4	BAMBANG RIZKI SAPUTRA	145
	5	ANNISAA	106
	6	MOHAMMAD ALFAN	43
	7	SAANIH SUSILAWATI	1.212
	8	ALDIMAS PRAMUDYA BUDIMAN	11
	9	EKA DHARMA SETIA ZALUKHU	38
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>2.761</b>

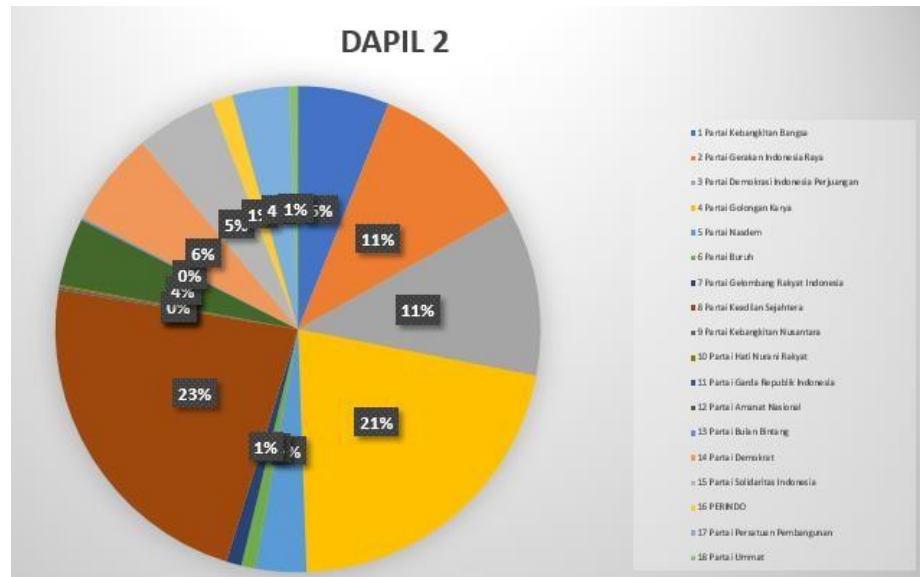
<b>A.1</b>	<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1.019
<b>A.2</b>	1	H. SUGENG PURNOMO	2.696
	2	ANIS FATONI	1.972
	3	SRI HASTUTY	140
	4	JAROT SUBROTO	342
	5	BUNYAMIN	934
	6	CLARA NATHASA	70
	7	REZA HOERUMAN	44
	8	DEVY PERMATASARI	80
	9	DJULEHA. R	97
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>		<b>7.394</b>

<b>A.1</b>	<b>24</b>	<b>Partai Ummat</b>	415
<b>A.2</b>	1	Hj. ZULFAHMI	293
	2	MOHAMMAD SADLIE	77
	3	INDRA PURNAMA	44
	4	ICHSAN PRADIPA	73
	5	MUHAMMAD FRANSNEDY	111
	6	ADINDA PUTRI	40
	7	IMAS NURLELAWATI	26
	8	WIWIK SUPRAPTINI	22
	9	MUHAMMAD DJODY SATRIANI	38
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		<b>1.139</b>



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil Dua yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 44.399 suara dengan persentase sebanyak 23%.

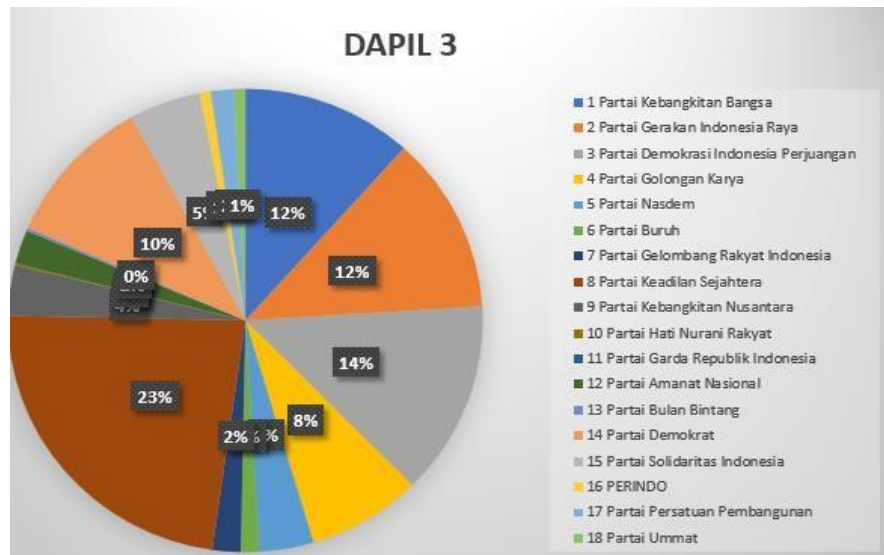


### 3) Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Cimanggis

NO	NAMA PARTAI	DAPIL 3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.097
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	15.990
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.551
4	Partai Golongan Karya	10.057
5	Partai Nasdem	4.782
6	Partai Buruh	1.628
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.495
8	Partai Keadilan Sejahtera	29.879
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.563
10	Partai Hati Nurani Rakyat	113
11	Partai Garda Republik Indonesia	-
12	Partai Amanat Nasional	3.086
13	Partai Bulan Bintang	266
14	Partai Demokrat	13.577
15	Partai Solidaritas Indonesia	6.289
16	PERINDO	986
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.026
18	Partai Ummat	1.007



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil Tiga yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 29.879

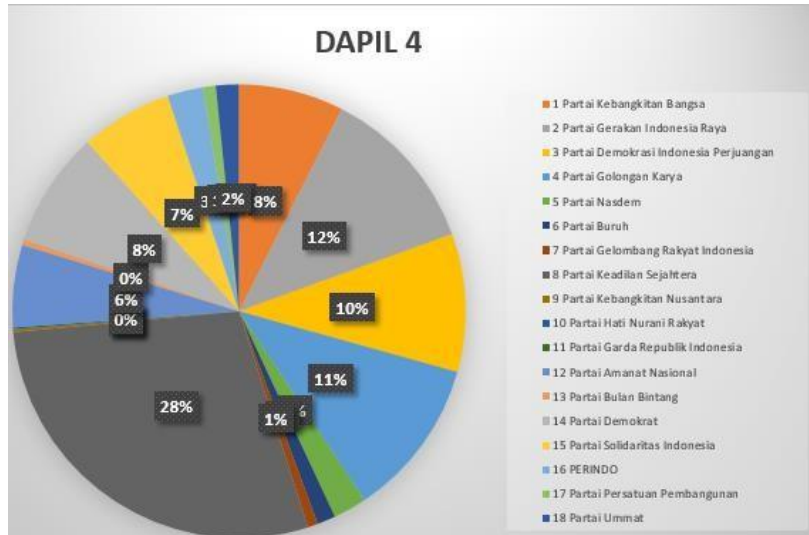


#### 4) Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Sukmajaya

NO	NAMA PARTAI	4
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.469
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	16.720
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.735
4	Partai Golongan Karya	15.829
5	Partai Nasdem	3.323
6	Partai Buruh	1.820
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.017
8	Partai Keadilan Sejahtera	39.701
9	Partai Kebangkitan Nusantara	288
10	Partai Hati Nurani Rakyat	179
11	Partai Garda Republik Indonesia	-
12	Partai Amanat Nasional	8.184
13	Partai Bulan Bintang	563
14	Partai Demokrat	11.507
15	Partai Solidaritas Indonesia	9.133
16	PERINDO	3.571
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.241
18	Partai Ummat	2.289



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil Empat yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 39.701



suara dengan persentase sebanyak 28%.

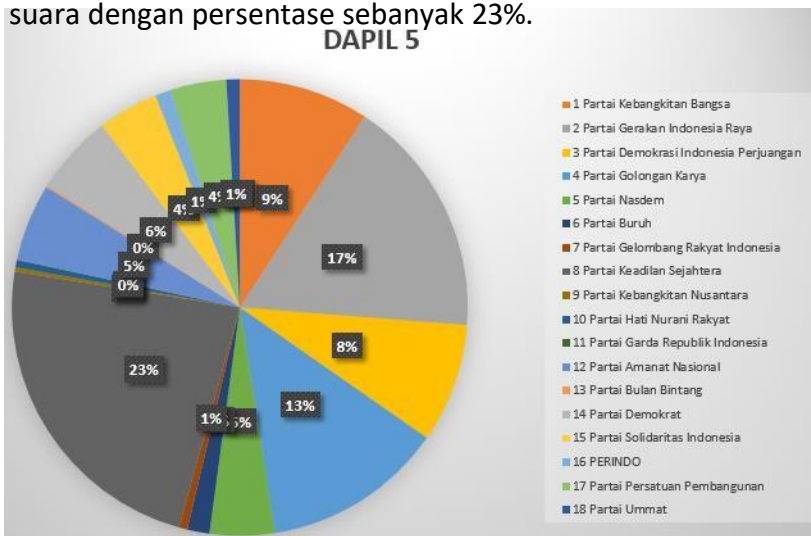
#### 5) Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Cilodong & Tapos

NO	NAMA PARTAI	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	21.606
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	39.719
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.725
4	Partai Golongan Karya	30.062
5	Partai Nasdem	10.744
6	Partai Buruh	3.685
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.406
8	Partai Keadilan Sejahtera	54.251
9	Partai Kebangkitan Nusantara	701
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.238
11	Partai Garda Republik Indonesia	-
12	Partai Amanat Nasional	12.854
13	Partai Bulan Bintang	298
14	Partai Demokrat	13.318
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.007
16	PERINDO	2.679
17	Partai Persatuan Pembangunan	9.226
18	Partai Ummat	2.223



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil Lima yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 54.251 suara dengan persentase sebanyak 23%.

DAPIL 5

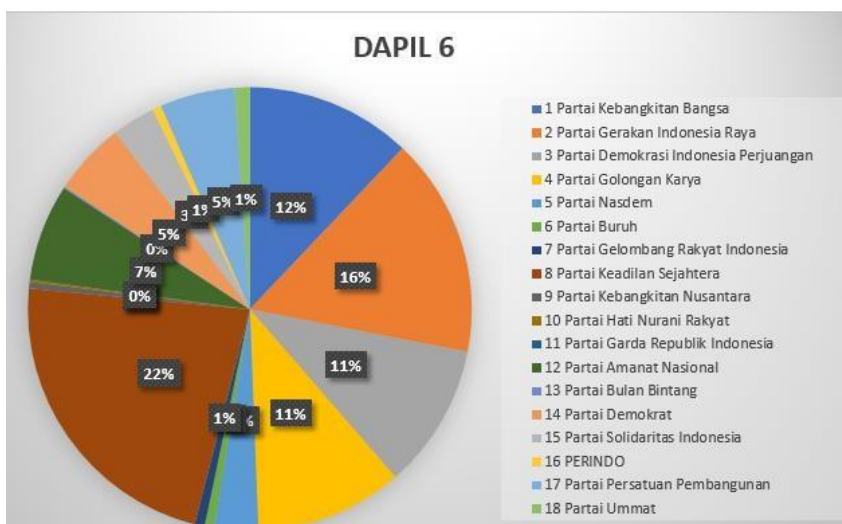


**6) Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Bojongsari, Sawangan & Cipayung**

NO	NAMA PARTAI	DAPIL 6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	30.842
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	40.758
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	26.894
4	Partai Golongan Karya	27.469
5	Partai Nasdem	8.192
6	Partai Buruh	1.731
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.865
8	Partai Keadilan Sejahtera	57.373
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.215
10	Partai Hati Nurani Rakyat	422
11	Partai Garda Republik Indonesia	-
12	Partai Amanat Nasional	17.992
13	Partai Bulan Bintang	279
14	Partai Demokrat	13.664
15	Partai Solidaritas Indonesia	7.957
16	PERINDO	1.685
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.942
18	Partai Ummat	2.770



Jika dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partai yang memiliki persentase paling tinggi pada Dapil Lima yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan Suara sebanyak 57.373 suara dengan persentase sebanyak 22%.



## 2. Saran Perbaikan/Rekomendasi

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024 merupakan Penyelenggaraan Pemilu bersejarah dikarenakan Tahun Politik dengan Pemilihan Serentak pertama Kali di Indonesia, dengan dinamika yang beragam banyak yang perlu di perbaiki dalam setiap pelasaannya seperti;

### a. Pendidikan Pemilih

Meningkatkan Program Pendidikan Pemilih untuk kalangan generasi Z atau Pemilih Pemula untuk memastikan bahwa pemilih muda kita memahami proses pemilihan dan pentingnya keikutsertaan aktif dalam proses demokratis.



**b. Pelatihan Petugas Pemilihan**

Pelatihan Petugas Pemilihan atau Penyelenggara Teknis sangat penting untuk memastikan bahwa petugas dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan termasuk melatih petugas untuk dapat menangani situasi darurat atau kontroversial yang mungkin terjadi di setiap TPS maupun Kelurahan, sehingga keputusan-keputusan cepat yang di ambil tidak merugikan Peserta Pemilu maupun penyelenggara pemilihan.

**c. Penegakan Hukum**

Memberikan Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam melakukan tugas teknis dalam menyiapkan dan menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara agar penyelenggaraan pemilu di kota Depok dapat berjalan lebih lancar , adil dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat.

**3. Tindak Lanjut Saran Perbaikan**

Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan di kota Depok, Bawaslu Kota Depok telah melakukan saran perbaikan secara langsung dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota, dalam saran perbaikan ini bawaslu kota Depok meminta KPU Kota Depok untuk melakukan pencermatan terhadap Hasil Penghitungan di Kecamatan Sawangan bahwa terdapat perubahan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sawangan.



#### **D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024**

Dinamika yang terjadi di Kota Depok saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 diantaranya banyak terjadi kekurangan surat suara di beberapa Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cipayung. Menurut hasil yang didapatkan dari Pengawas Kecamatan, untuk Kecamatan Sukmajaya dan Cimanggis Kekurangan surat Suara Jenis PPWP dan Panwascam langsung memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk menunda dan mencari kekurangan Surat Suara tersebut yang kemudian bisa didapatkan oleh PPK dan Pemungutan suara dilanjutkan kembali. Pada Kecamatan Cipayung terdapat keberatan dari salah seorang saksi karena KPPS tetap melanjutkan proses pemungutan suara meskipun adanya kekurangan surat suara. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk KPU serta jajaran, kemudian Bawaslu serta jajaran untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada kasus tersebut.

Hasil diskusi dan kesepakatan bersama akhirnya pemilih yang terdaftar dalam DPT kembali dipanggil untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya untuk melakukan hasil tindak lanjut yang sudah diberikan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan, dinamika yang sudah dilalui bisa teratasi



dengan koordinasi yang intens ke jajaran PPK sampai dengan KPPS di masing-masing wilayah Kecamatan.

Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan dan ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 didapatkan dinamika yang terjadi. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 pada masa tenang, dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto dan oleh Pimpinan Bawaslu Kota Depok. Dari KPU Kota Depok hadir pimpinan beserta jajaran. Kemudian dari unsur jajaran Kepolisian, KODIM 0508 Kota Depok, jajaran Pemerintahan oleh Satpol PP Kota Depok, Saksi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1,2, dan 3, Saksi Partai, Saksi Calon DPD. Kegiatan dibuka pukul 13.00 WIB, dengan pembacaan tata tertib pleno oleh Ketua KPU Kota Depok. Dalam kesempatannya Ketua KPU Kota Depok menyampaikan bahwa kesiapan pada pleno terbuka ini dari segi data sudah siap 80%, karena memang ketentuan atas Peraturan KPU yang mana sudah terjadwal bahwa jadwal yang sudah ditentukan dimulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024, dilaksanakan di Hotel Santika, Kota Depok. Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dalam kesempatan ini diwakili Anggotanya menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Depok baru dimulai pada tanggal 28 Kecamatan karena dilihat dari kesiapan PPK yang juga sedang



melakukan pleno ditingkat Kecamatan belum 100% selesai. KPU Kota Depok menjadwalkan pembacaan Rekap kepada PPK sampai dengan tanggal 5 Maret 2024. Diawali dengan 2 Kecamatan yaitu Beji dan Cinere. Pembacaan jenis perolehan suara diawali dengan urutan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN/KOTA.

Dari kejadian pada saat Rekapitulasi pertama bahwa masih ditemukan adanya suara dari Partai Garuda yang pada kesempatan ini sudah dilakukan diskualifikasi oleh KPU Kota Depok pada Surat Keputusan No. 20 tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dari hasil kesepakatan pimpinan dan peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum tahun 2024 bahwa suara dari partai Garuda dimasukkan kedalam suara Tidak Sah. Ada kejadian bahwa sistem yang dimiliki oleh KPU Kota Depok tidak membaca angka/ masih ada tanda merah di kategori Surat Suara Sah nya. Atas intruksi pimpinan sidang dan Bawaslu Kota Depok meminta saran perbaikan langsung kepada PPK dan KPU Kota Depok untuk melakukan perbaikan pada sistem. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata ada satu suara dari partai Nasdem tidak terinput, dan Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia tidak ditulis pada jumlah di C Hasil. Setelah dilakukan pencermatan pada saat rekapitulasi, akhirnya kendala yang ditemukan sudah bisa teratasi dan Rekapitulasi untuk Kecamatan Limo bisa dilanjutkan. Dari kejadian pada saat Rekapitulasi bahwa masih ditemukan adanya perbedaan data D Hasil



Kecamatan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dengan D Hasil yang dibacakan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kota. Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan keberatan bahwasanya terjadi banyak permasalahan seperti penambahan suara di beberapa partai pada Kecamatan Sawangan khususnya di Kelurahan Kedaung dan Sawangan Baru, dan pada semua jenis suara kecuali presiden dan wakil presiden. Bawaslu Kota Depok meminta kepada KPU Kota Depok untuk melakukan Sampling pada 2 TPS pada kelurahan kedaung dan ditemukan hasilnya memang berbeda. Hal ini tentu menjadi perhatian khususnya oleh Bawaslu Kota Depok.

Bawaslu Kota Depok memberikan saran perbaikan secara langsung kepada pimpinan sidang untuk melakukan pencermatan ulang pada case yang ada pada Kecamatan Sawangan dan menskors sidang sebelum datanya diperbaiki terlebih dahulu, melalui kesepakatan forum Pleno. Pada kesempatannya pimpinan sidang pada kesepakatannya membuka dua panel, yaitu satu panel untuk meneruskan Rekapitulasi yang sudah berjalan. dan panel kedua pencermatan yang dilakukan oleh PPK Sawangan, saksi partai Politik, KPU Kota Depok, dan Panwaslu Kecamatan Sawangan. Untuk kecamatan Cilodong pada saat akhir penyampaian pendapat untuk jenis suara DPRD Kab/Kota partai Solidaritas Indonesia mengklaim bahwa saksi di setiap TPS menemukan adanya penambahan suara pada partai Nasdem, dan ini ditemukan pada satu Kelurahan di Cilodong yaitu Kelurahan Sukamaju. Asumsi Partai Solidaritas Indonesia bahwasanya hasil dari saksi yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan C



Hasil milik KPU Kota Depok.

Namun saksi Partai Solidaritas Indonesia tetap menandatangani Berita Acara yang diberikan oleh PPS/PPK dan tidak menyampaikan keberatan pada saat Pleno tingkat Kecamatan berlangsung. Dan Partai Solidaritas Indonesia tidak memberikan Data yang akurat terhadap apa yang sudah ditemukan oleh para saksinya di TPS. KPU Kota Depok melalui surat pemberitahuan nomor 143/PL.02.6-SD/3276/2024 terkait pemberitahuan dan permohonan perpanjangan waktu Rekapitulasi atas beberapa kendala yang terjadi dan Kecamatan yang belum selesai Pleno pada tingkat Kecamatan. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi atas hasil kesepakatan bersama di forum akhirnya memperpanjang waktu pembacaan Rekapitulasi di tingkat Kota Depok. Lanjutan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Sawangan dengan case yang terjadi pada wilayahnya terkait penggelembungan suara yang ditemukan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa ditemukan data yang tidak sinkron dengan hasil saksinya pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sawangan. Kesepakatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kota Depok, menghentikan sementara proses pembacaan rekapitulasi di tingkat Kota sampai dengan koreksi dan pencermatan ulang dilakukan. Pembacaan dilakukan oleh Anggota PPK Kecamatan Sawangan. Pembacaan Rekapitulasi pada Kecamatan Sawangan pasca pencermatan dimulai pada jenis suara DPR RI. Pendapat atas pembacaan rekapitulasi yang telah dilakukan dalam pembacaan jenis suara DPR RI Bawaslu Kota



Depok dan saksi partai Politik menyampaikan bahwa perlu adanya penelusuran terkait penambahan suara yang terjadi pada Kecamatan Sawangan.

Hal ini harus menjadi perhatian serius KPU Kota Depok dalam mengambil langkah dan kebijakan atas apa yang telah terjadi pada Kecamatan Sawangan. Kemudian pada pembacaan Rekapitulasi pada jenis suara DPD berjalan dengan lancar dan tanpa kendala sampai dengan pembacaan jenis suara DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat pleno rekapitulasi Partai Nasdem menyatakan Walk Out dari sidang pleno karena keberatan atas tuduhan penggelembungan suara yang ditemukan. Dan hal yang sama terjadi pada Kecamatan Tapos. tanggal 09 Maret 2024 hasil perhitungan rekapitulasi suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan telah dibacakan seluruhnya. Selanjutnya KPU Kota Depok melakukan pleno dengan pembacaan rekapitulasi di tingkat Kota Depok. Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kota Depok dihadiri oleh perwakilan DPRD Kota Depok, Kapolres Metro Depok, dan Kesbangpol Kota Depok. Kemudian masing-masing saksi peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan berupa kritik maupun saran, para saksi peserta Pemilu memberikan apresiasi kepada Penyelenggara Pemilu, baik kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya atas kerja keras selama tahapan Pemilu di Kota Depok. Para saksi atau pun peserta Pemilu yang hadir dalam Rapat Pleno rekapitulasi tersebut berharap agar kedepannya demokrasi di Kota Depok dapat lebih maju dan lebih baik lagi.

Pembacaan hasil rekapitulasi selesai dibacakan dan disepakati oleh



seluruh saksi Partai yang hadir pada pukul 05.00 WIB. Adapun saksi Partai yang hadir terdiri dari PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NASDEM, Partai Buruh, GELORA, PKS, PKN, HANURA, PAN, DEMOKRAT, PSI, PERINDO, PPP, dan Partai Ummat. Setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat Kota Depok selesai, maka berkas dimaksud akan diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat yang diagendakan pada pukul 12.30 WIB. Dengan demikian hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilu 2024 di tingkat Kota Depok telah mendapat legitimasi dari seluruh para saksi partai yang hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan tersebut.



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi pengawasan di lembaga Bawaslu Kota Depok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang pemilu tahun 2024 Bawaslu Kota Depok khususnya melalui Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya. Diantara tugas yang dilaksanakan adalah memetakan potensi kerawanan serta melakukan upaya-upaya pencegahan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, terkhusus untuk pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024. serta mengembangkan pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan membangun pola kemitraan dan hubungan antar lembaga;
2. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi kelembagaan, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, termasuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, stakeholder dan instansi terkait lainnya untuk memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

## B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024, Bawaslu Kota Depok dalam melaksanakan pengawasannya ada beberapa saran yang harus diperbaiki, diantaranya :

1. Bawaslu Kota Depok dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu di wilayah Kota Depok membutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang akan menunjang setiap kegiatan pengawasan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara optimal;
2. Perlu adanya pelatihan khusus atau bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di Bawaslu Kota Depok khususnya dalam bidang pencegahan, pengawasan dan kehumasan;
3. Sarana media elektronik yang memadai yang berhubungan dengan kehumasan berkaitan dengan video shoot, edit video, pembuatan spanduk atau banner maupun upload video harus ditunjang dengan ketersediaan Laptop atau Komputer dengan spek yang memadai, karena hal ini sangat dibutuhkan pada saat melakukan pengawasan.
4. Sumber anggaran yang memadai demi terlaksananya kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat





### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi pengawasan di lembaga Bawaslu Kota Depok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih, Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dan penting untuk analisis. Berikut beberapa poin yang dapat disoroti.
  - a. Tingkat Partisipasi: Ada peningkatan yang terlihat dalam tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat mengenai pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan negara.
  - b. Faktor Pendorong: Beberapa faktor yang mendorong partisipasi ini termasuk kampanye edukasi pemilih, peningkatan akses ke informasi, serta penggunaan teknologi yang mempermudah proses pemungutan suara.
  - c. Demografi Pemilih: Analisis menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya meningkat di kalangan pemilih muda, tetapi juga di segmen-segmen lain, seperti perempuan dan kelompok marginal, yang sebelumnya mungkin kurang terlibat.
  - d. Pengaruh Sosial Media: Media sosial berperan besar dalam mobilisasi pemilih, menyediakan platform untuk diskusi politik dan penyebaran informasi yang relevan, yang menarik lebih banyak orang untuk terlibat dalam pemilu.
  - e. Tantangan yang Dihadapi: Meskipun ada peningkatan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti apatisme di kalangan pemilih

tertentu, kesulitan akses ke tempat pemungutan suara, dan penyebaran informasi yang keliru.

- f. Rekomendasi: Untuk pemilu mendatang, penting untuk terus meningkatkan program edukasi pemilih, memperbaiki aksesibilitas, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik secara lebih luas.

Secara keseluruhan, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 menunjukkan tren positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

2. Proses Pemilihan yang Transparan, Proses pemilihan yang transparan adalah salah satu elemen kunci dalam menjamin integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan transparansi dalam proses pemilihan Pemilu 2024:
  - a. Pengawasan Independen: Terlibatnya lembaga pengawas independen dan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu membantu memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Akses Informasi: Pemilih dan publik diberikan akses yang jelas terhadap informasi terkait proses pemilihan, termasuk tata cara pemungutan suara, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara secara real-time.
  - c. Sistem Teknologi yang Aman: Penggunaan teknologi informasi, seperti e-voting atau aplikasi penghitungan suara, dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah manipulasi data.
  - d. Pelaporan Hasil: Proses penghitungan suara dilakukan dengan transparan, di mana hasilnya dapat dilihat oleh pemantau dan masyarakat umum. Pengumuman hasil dilakukan secara terbuka dan akuntabel.



- e. Sosialisasi Proses: Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mendidik masyarakat mengenai tata cara dan aturan pemilu turut berkontribusi terhadap transparansi.
- f. Tanggapan terhadap Laporan Pelanggaran: Ada mekanisme yang jelas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atau ketidakpuasan dari pemilih, sehingga menciptakan rasa percaya bahwa setiap keluhan akan ditangani dengan serius.
- g. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai saksi, membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dengan melaksanakan semua aspek tersebut, Pemilu 2024 dapat dianggap sebagai contoh proses pemilihan yang transparan, yang penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

- 3. Keberagaman Pilihan, Keberagaman pilihan dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai keberagaman pilihan dalam pemilu ini:
  - a. Calon dari Berbagai Latar Belakang: Pemilu 2024 menyaksikan banyaknya calon dari berbagai latar belakang, termasuk politikus senior, aktivis, profesional, dan tokoh masyarakat. Ini memberikan pemilih lebih banyak pilihan untuk memilih sosok yang mereka anggap paling mewakili aspirasi mereka.
  - b. Partai Politik yang Beragam: Banyaknya partai politik yang berpartisipasi memungkinkan adanya beragam ideologi dan platform. Pemilih memiliki kesempatan untuk memilih partai yang paling sesuai dengan pandangan dan kepentingan mereka.



- c. Keterwakilan Gender: Terdapat peningkatan dalam keterwakilan perempuan di dalam daftar calon, yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan keadilan gender dalam politik.
- d. Perwakilan Daerah dan Komunitas: Calon dari berbagai daerah dan komunitas etnis di seluruh Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, terdengar dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Isu-isu yang Beragam: Kampanye pemilu 2024 juga menyoroti berbagai isu yang relevan, seperti perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, menciptakan ruang bagi pemilih untuk memilih berdasarkan isu yang paling penting bagi mereka.
- f. Debat Publik dan Diskusi: Berbagai forum debat dan diskusi yang melibatkan calon membantu masyarakat memahami perbedaan pandangan dan kebijakan, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informasi.
- g. Tantangan dalam Keberagaman: Meskipun keberagaman pilihan sangat positif, tetap ada tantangan seperti polarisasi yang dapat terjadi akibat perbedaan pandangan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dialog yang konstruktif di antara semua pihak.

Secara keseluruhan, keberagaman pilihan dalam Pemilu 2024 mencerminkan kekayaan demokrasi di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Ini juga menandakan kemajuan dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif.



4. Tantangan dan Peningkatan, Tantangan dan peningkatan dalam Pemilu 2024 mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin yang relevan:

a) Tantangan

- 1) **Misinformasi dan Disinformasi:** Penyebaran berita palsu dan informasi menyesatkan melalui media sosial dapat mempengaruhi pemilih dan menciptakan kebingungan tentang calon dan isu-isu penting.
- 2) **Apatisme Pemilih:** Meskipun ada peningkatan partisipasi, masih ada segmen masyarakat yang apatis atau skeptis terhadap proses politik, yang bisa mengurangi tingkat partisipasi di masa depan.
- 3) **Polarisasi Politik:** Terdapat potensi meningkatnya polarisasi di antara kelompok politik yang berbeda, yang dapat memicu ketegangan sosial dan konflik.
- 4) **Keamanan dan Kestabilan:** Ancaman keamanan, termasuk potensi kerusuhan atau konflik saat pemungutan suara, tetap menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu.
- 5) **Aksesibilitas:** Meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua pemilih, termasuk yang tinggal di daerah terpencil dan penyandang disabilitas, memiliki akses yang memadai untuk memberikan suara.
- 6) **Pelanggaran Etika:** Kasus pelanggaran etika atau praktik curang dalam kampanye bisa merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik.

b) Peningkatan

- 1) **Edukasi Pemilih:** Program edukasi yang lebih intensif tentang proses pemilu, hak pemilih, dan pentingnya suara mereka dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.



- 2) **Penggunaan Teknologi:** Penerapan teknologi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara, termasuk sistem digital, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- 3) **Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat:** Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu dapat membantu menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel.
- 4) **Perbaikan Sistem Pemungutan Suara:** Inovasi dalam sistem pemungutan suara, seperti penyederhanaan prosedur dan peningkatan keamanan, dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 5) **Penguatan Regulasi:** Memperkuat regulasi terkait kampanye, pendanaan politik, dan pelanggaran pemilu dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih adil.
- 6) **Promosi Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam diskusi dan debat publik, dapat memperkuat demokrasi.

Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif dan mengimplementasikan langkah-langkah peningkatan yang diperlukan, Pemilu 2024 dapat menjadi momen penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.



## B. REKOMENDASI

Sesuai Hasil Pengawasan Yang Disampaikan Dalam Catatan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kota Depok Ini, Maka Dapat Disampaikan Beberapa Hal Sebagai Rekomendasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok, Peran Dan Fungsi Kelembagaan Kedepan, Antara Lain:

1. Setiap kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Depok, kedepannya diharapkan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan rapi, sehingga mempermudah dalam proses penyusunan Laporan Akhir apabila diperlukan.
2. Bahwa segala aktivitas pengawasan, pencegahan dan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok Divisi sedapat mungkin disusun menjadi sebuah Laporan Akhir yang menarik dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Merekomendasikan Laporan Akhir ini untuk dijadikan bahan evaluasi bagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga pengawas Pemilu, khususnya pada Lembaga Penyelenggara Pemilu.

